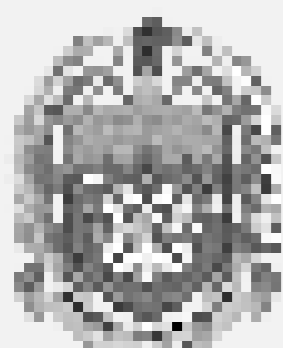
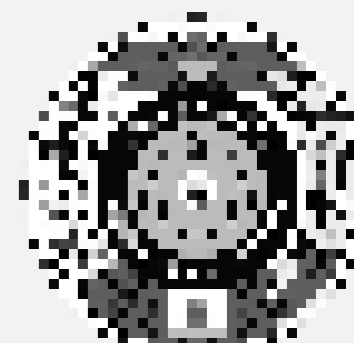


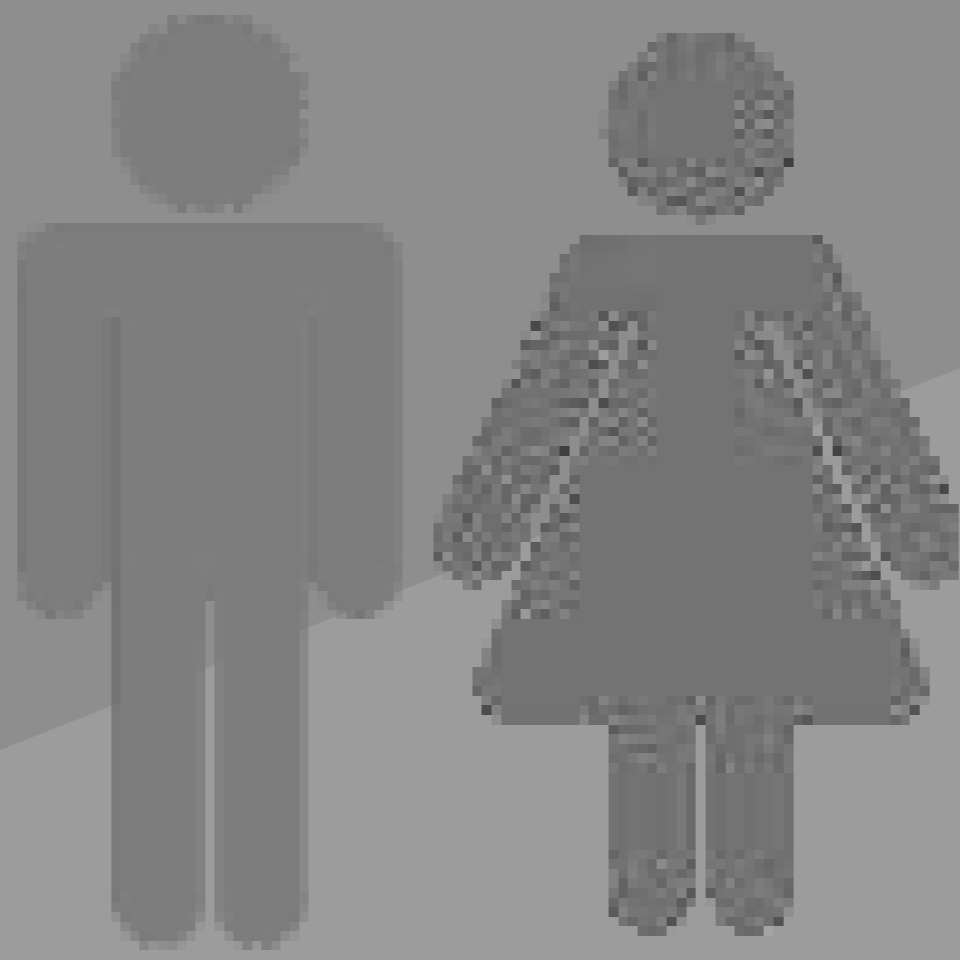
PROFIL GENDER

**PROVINSI SUMATERA UTARA
2017**



**KERJASAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVSU
DENGAN LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**





DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA SAMBUTAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.....	Latar
Belakang.....	1
1.2.....	Tujuan
.....	3
1.3.....	Sumber
Data.....	4
1.4.....	Metode
Penelitian.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH	5
2.1. Geografi	5
2.2. Sejarah.....	5
2.3. Sosial Budaya.....	10
BAB III JUMLAH KOMPOSISI PENDUDUK	13
3.1. Jumlah Penduduk	14
BAB IV PENDIDIKAN	23
4.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan.....	25
4.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah..	29
4.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan.....	33
4.4. Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kelompok Umur.....	36
4.5. Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin.....	41
4.6. Persentase Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi	45
4.7. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut Jenis Kelamin	48
4.8. Jumlah Guru Negeri / Swasta Yang Telah Memperoleh Sertifikasi.....	51
4.9. Jumlah Peserta Kejar Paket A, B, dan C Serta Keaksaraan Fungsional (KF) Menurut Jenis Kelamin, dan Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	57
4.10. Jumlah Kelulusan Paket A, B, dan C Menurut Jenis Kelamin, dan Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	59

BAB V BIDANG SUMBER DAYA ALAM (SDA) DAN LINGKUNGAN	61
5.1. Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan di Provinsi Sumatera Utara	61
5.2. Dampak Bencana Lingkungan Terhadap Gender.....	64
BAB VI KESEHATAN.....	66
6.1. Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Jenis Kelamin.....	67
6.2. Persentase Penyebab Kematian Ibu Pada Masa Hamil, Melahirkan dan Nifas Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	70
6.3. Jumlah dan Persentase Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) Ke Sarana Pelayanan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Di Provsu.....	74
6.4. Jumlah dan Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) Pada Ibu Hamil Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	76
6.5. Jumlah dan Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	79
6.6. Jumlah dan Persentase Ibu Hamil Yang Beresiko Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	81
6.7. Jumlah Penderita HIV/AIDS Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	84
6.8. Jumlah Pernikahan Menurut Usia Perkawinan, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	87
6.9. Persentase Penduduk Perempuan Usai 10 Tahun Keatas Menurut Usia Perkawinan Pertama dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	89
6.10. Jumlah Peserta/Akseptor Keluarga Berencana Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	91
6.11. Unmet Need, Jumlah PUS dan Jumlah WUS Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	94
6.12. Pengguna Narkoti, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	97
BAB VII TINGKAT PARTISIPASI ANGGARAN KERJA (TPAK) BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN, JENIS KELAMIN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA....	98
7.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	101

7.2. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	103
7.3. Pekerja Di Sektor Formal Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	105
7.4. Pekerja Di Sektor Informal Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	107
7.5. Jumlah Pekerja Di Lembaga Pemerintahan Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	109
7.6. Jumlah Pekerja Di Lembaga Non Pemerintahan Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	111
7.7. Keanggotaan Koperasi Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	113
7.8. Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	115
7.9. Jumlah Pekerja Tidak Dibayar Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	117
7.10. Jumlah Dan Persentase Perempuan Pekerja Profesional Dan Manajerial Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara..	119
7.11. Jumlah Pekerja Menurut Lapangan Usaha, Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	120
7.12. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	125
7.13. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan, Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	131
BAB VIII POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN.....	137
8.1. Jumlah Bupati/Walikota Dan Wakil Bupati/Walikota Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	136
8.2. Jumlah Camat Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	141
8.3. Jumlah PNS Menurut Golongan, Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	144
8.4. Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara.....	147
8.5. Jumlah Jaksa Menurut Jabatan Jaksa, Jenis Kelamin di Wilayah	

Provinsi Sumatera Utara.....	151
8.6. Jumlah Hakim Dan Pejabat Menurut Jenis Jabatan Hakim Dan Jenis Kelamin di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Utara.....	155
8.7. Jumlah Hakim Menurut Jenis Jabatan Hakim, Jenis Kelamin Dipengadilan Negeri Di Provinsi Sumatera Utara.....	158
8.8. Jumlah Polisi Menurut Jenis Kepangkatan Dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara.....	161
8.9. Jumlah Pejabat Kepolisian Menurut Jenis Kelamin Dan Wilayah di Provinsi Sumatera Utara.....	169
BAB IX HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA.....	172
9.1. Jumlah Penghuni Menurut Jenis Lapas Dan Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Utara.....	172
BAB X DATA KEKERASAN	175
10.1. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	175
10.2. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	182
10.3. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	184
10.4. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	187
10.5. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	190
10.6. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Layanan yang Diberikan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	193

10.7. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	196
.....	
DAFTAR PUSTAKA.....	205

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	14
Tabel 3.2. Jumlah dan Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin.....	15
Tabel 3.3. Jumlah (Persentase) Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin.....	19
Tabel 3.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).....	22
Tabel 4.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan.....	26
Tabel 4.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah.....	29
Tabel 4.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan.....	33
Tabel 4.4. Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kelompok Umur.....	37
Tabel 4.5. Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin.....	42
Tabel 4.6. Persentase Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan.....	45
Tabel 4.7. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut Jenis Kelamin.....	48
Tabel 4.8. Jumlah Guru Negeri/Swasta Yang Telah Memperoleh Sertifikasi.....	52
Tabel 4.9. Jumlah Peserta Kejar Paket A, B, Dan C Serta Keaksaraan Fungsional (Kf) Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	58
Tabel 4.10. Jumlah Kelulusan Paket A, B, dan C menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	59
Tabel 5.1. Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan di Provinsi Sumatera....	61
Tabel 5.2. Dampak Bencana Lingkungan Terhadap Gender dan Anak di Provinsi Sumatera Utara.....	64
Tabel 6.1. Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Persentase Tahun dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	67

Tabel 6.2. Jumlah Dan Usia Kematian Ibu Hamil, Melahirkan, Dan Nifas Menurut Kelompok Usia Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	70
Tabel 6.3. Jumlah Dan Persentase Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) Ke Sarana Pelayanan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	74
Tabel 6.4. Jumlah dan Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) Pada Ibu Hamil Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	76
Tabel 6.5 Jumlah Dan Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	79
Tabel 6.6. Jumlah Dan Persentase Ibu Hamil Yang Beresiko Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	81
Tabel 6.7. Jumlah Penderita HIV/AIDS Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	84
Tabel 6.8. Jumlah Pernikahan Menurut Usia Perkawinan, Jenis Kelamin, Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	87
Tabel 6.9. Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Keatas Menurut Usia Perkawinan Pertama Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	89
Tabel 6.10. Jumlah Peserta/Akseptor Keluarga Berencana Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	91
Tabel 6.11. Unmet Need, Jumlah Pus Dan Jumlah Wus Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	94
Tabel 6.12. Pengguna Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (Napza) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	97
Tabel 7.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	101

Tabel 7.2. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	103
Tabel 7.3. Pekerja Di Sektor Formal Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	105
Tabel 7.4. Pekerja di Sektor Informal Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	107
Tabel 7.5. Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintahan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	109
Tabel 7.6. Jumlah Pekerja di Lembaga Non Pemerintahan Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	111
Tabel 7.7. Keanggotaan Koperasi Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	113
Tabel 7.8. Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	115
Tabel 7.9. Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin	117
Tabel 7.10. Jumlah Dan Prosentase Perempuan Pekerja Profesional Dan Manajerial Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	119
Tabel 7.11. Jumlah Pekerja Menurut Lapangan Usaha, Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	120
Tabel 7.12. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	125
Tabel 7.13. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan, Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	131
Tabel 8.1. Jumlah Bupati/Walikota Dan Wakil Bupati/Walikota Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	138
Tabel 8.2. Jumlah Camat Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	141

Tabel 8.3. Jumlah Camat Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	145
Tabel 8.4. Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	149
Tabel 8.5. Jumlah Jaksa Menurut Jabatan Jaksa, Jenis Kelamin di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.....	151
Tabel 8.6. Jumlah Hakim Dan Pejabat Menurut Jenis Jabatan Hakim Dan Jenis Kelamin Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Utara.....	157
Tabel 8.7. Jumlah Hakim Menurut Jenis Jabatan Hakim, Jenis Kelamin Dipengadilan Negeri di Provinsi Sumatera Utara.....	158
Tabel 8.8. Jumlah Polisi Menurut Jenis Kepangkatan Dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara.....	166
Tabel 8.9. Jumlah Pejabat Kepolisian Menurut Jenis Kelamin Dan Wilayah di Provinsi Sumatera Utara.....	169
Tabel 9.1. Jumlah Penghuni Menurut Jenis Lapas Dan Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Utara.....	172
Tabel 10.1. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	180
Tabel 10.2. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	182
Tabel 10.3. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Pekerjaan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	184
Tabel 10.4. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	187
Tabel 10.5. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	

Menurut Tempat Kejadian dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	190
.....	

Tabel 10.6. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Layanan Yang Diberikan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	193
.....	

Tabel 10.7. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	196
.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Grafik Persentase Penduduk Menurut Agama.....	11
Gambar 2.2. Grafik Persentase Penduduk Menurut Suku Bangsa	12
Gambar 3.1. Grafik Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara.....	15
Gambar 3.2. Grafik Jumlah dan Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin.....	17
Gambar 3.3. Grafik Jumlah (Persentase) Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin.....	21
Gambar 4.1. Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan SD dan Jenis Kelamin.....	27
Gambar 4.2. Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan SLTP dan Jenis Kelamin.....	28
Gambar 4.3. Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan SLTA dan Jenis Kelamin.....	28
Gambar 4.4. Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin (Laki-Laki).....	31
Gambar 4.5. Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin (Perempuan).....	32
Gambar 4.6. Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin (Laki-Laki+Perempuan).....	32
Gambar 4.7. Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan (SD) dan Jenis Kelamin.....	34
Gambar 4.8. Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan (SLTP) dan Jenis Kelamin.....	35
Gambar 4.9. Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan (SLTA) dan Jenis Kelamin.....	35
Gambar 4.10. Grafik Persentase Laki-Laki Angka Melek Huruf.....	39
Gambar 4.11. Grafik Persentase Perempuan Angka Melek Huruf.....	40
Gambar 4.12. Grafik Persentase Laki-Laki+Perempuan Angka Melek Huruf.	40
Gambar 4.13. Grafik Persentase Jumlah Siswa Putus Sekolah Jenjang SD.....	44

Gambar 4.14. Grafik Persentase Jumlah Siswa Putus Sekolah Jenjang SLTP.	44
Gambar 4.15. Grafik Persentase Jumlah Siswa Putus Sekolah Jenjang SLTA.	44
Gambar 4.16. Grafik Persentase Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi (SD) yang Ditamatkan.....	47
Gambar 4.17. Grafik Persentase Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi (SLTP) yang Ditamatkan.....	47
Gambar 4.18. Grafik Persentase Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi (SLTA) yang Ditamatkan.....	48
Gambar 4.19. Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin.....	50
Gambar 4.20. Grafik Jumlah Guru SD Yang Bersertifikasi.....	56
Gambar 4.21. Grafik Jumlah Guru SLTP Yang Bersertifikasi.....	56
Gambar 4.22. Grafik Jumlah Guru SLTA Yang Bersertifikasi.....	57
Gambar 6.1. Grafik Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Persentase.....	69
Gambar 6.2. Grafik Jumlah Kematian Ibu Hamil.....	72
Gambar 6.3. Grafik Jumlah Kematian Ibu Bersalin.....	72
Gambar 6.4. Grafik Jumlah Kematian Ibu Nifas.....	73
Gambar 6.5. Grafik Jumlah Kematian Ibu.....	73
Gambar 6.6. Grafik Jumlah K1 dan K4.....	75
Gambar 6.7. Grafik Persentase K1 dan K4.....	75
Gambar 6.8. Grafik Persentase Imunisasi Tetanus Toksoid Pada Ibu Hamil...	78
Gambar 6.9. Grafik Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe).....	80
Gambar 6.10. Grafik Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe).....	80
Gambar 6.11. Grafik Persentase Jumlah Ibu Hamil Yang Beresiko Menurut Kabupaten/Kota.....	82
Gambar 6.12. Grafik Jumlah Ibu Hamil Yang Beresiko.....	83
Gambar 6.13. Grafik Persentase Penderita HIV.....	85
Gambar 6.14. Grafik Persentase Penderita AIDS.....	86
Gambar 6.15. Grafik Persentase Jumlah Pernikahan Menurut Usia Perkawinan.....	88
Gambar 6.16. Grafik Persentase Penduduk Perempuan Menurut Usia 10 Tahun Keatas Menurut Perkawinan Pertama.....	90

Gambar 6.17. Grafik Persentase Keluarga Berencana Menurut Jenis Kelamin	93
Gambar 6.18. Grafik Persentase Unmet Need.....	95
Gambar 6.19. Grafik Persentase PUS.....	96
Gambar 6.20. Grafik Pengguna NAPZA, Psikotropika dan Zat Adiktif.....	97
Gambar 7.1. Grafik Persentase Tingkat Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin.....	102
Gambar 7.2. Grafik Persentase Jumlah Penduduk Miskin.....	104
Gambar 7.3. Grafik Persentase Pekerja di Sektor Formal Menurut Jenis Kelamin.....	106
Gambar 7.4. Grafik Persentase Pekerja di Sektor Informal Menurut Jenis Kelamin.....	108
Gambar 7.5. Grafik Jumlah Pekerja Perempuan Di Lembaga Pemerintahan	110
Gambar 7.6. Grafik Jumlah Pekerja Di Lembaga Non Pemerintahan Menurut Jenis Kelamin.....	112
Gambar 7.7. Grafik Keanggotaan Koperasi Menurut Jenis Kelamin.....	114
Gambar 7.8. Grafik Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin.	116
Gambar 7.9. Grafik Jumlah Pekerja Tidak Dibayar Menurut Jenis Kelamin. .	118
Gambar 7.10. Grafik Perempuan Pekerja Profesional dan Manajerial.....	119
Gambar 7.11. Grafik Lapangan Usaha Menurut Jenis Kelamin Laki-Laki.....	123
Gambar 7.12. Grafik Lapangan Usaha Menurut Jenis Kelamin Perempuan....	123
Gambar 7.13. Grafik Lapangan Usaha Menurut Jenis Kelamin Laki-Laki+Perempuan.....	124
Gambar 7.14. Grafik Persentase Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan.....	130
Gambar 7.15. Grafik Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin.....	136
Gambar 8.1. Grafik Jumlah Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) Menurut Jenis Kelamin.....	140
Gambar 8.2. Grafik Jumlah Kepala Daerah (Wakil Bupati/Wali Kota) Menurut Jenis Kelamin.....	140
Gambar 8.3. Grafik Jumlah Camat Menurut Jenis Kelamin.....	143
Gambar 8.4. Grafik Jumlah PNS Menurut Golongan, Jenis Kelamin.....	146
Gambar 8.5. Grafik Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin.....	150
Gambar 8.6. Grafik Jaksa Menurut Jabatan Jaksa-Struktural.....	154

Gambar 8.7. Grafik Jaksa Menurut Jabatan Jaksa-Fungsional.....	154
Gambar 8.8. Grafik Jaksa Menurut Jabatan Jaksa.....	154
Gambar 8.9. Grafik Jumlah Hakim Dan Pejabat Menurut Jenis Jabatan Hakim Dan Jenis Kelamin Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Tinggi Agama.....	157
Gambar 8.10. Grafik Hakim Menurut Jenis Jabatan-Ketua.....	160
.....	
Gambar 8.11. Grafik Jumlah Polisi Menurut Jenis Kepangkatan dan Jenis Kelamin.....	167
Gambar 8.12. Grafik Jumlah Pejabat Kepolisian Kapolda Menurut Jenis Kelamin.....	171
Gambar 8.13. Grafik Jumlah Pejabat Kepolisian Kapolsek Menurut Jenis Kelamin.....	171
Gambar 9.1. Grafik Jumlah Penghuni Lapas.....	174
Gambar 10.1. Grafik Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur.....	181
.....	
Gambar 10.2. Grafik Persentase Total Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur.....	181
Gambar 10.3. Grafik Persentase Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan.....	183
Gambar 10.4. Grafik Persentase Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan.....	183
Gambar 10.5. Grafik Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan.....	186
.....	
Gambar 10.6. Grafik Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan.....	189
Gambar 10.7. Grafik Persentase Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Jenis Kekerasan.....	189
Gambar 10.8. Grafik Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian.....	191
Gambar 10.9. Grafik Persentase Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian.....	194
.....	

Gambar 10.10. Grafik Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Layanan Yang Diberikan.....	195
.....	
Gambar 10.11. Grafik Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kelamin.....	198
.....	
Gambar 10.12. Grafik Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur.....	198
Gambar 10.13. Grafik Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Hubungan dengan korban.....	201
.....	
Gambar 10.14. Grafik Korban Perdagangan Orang Menurut Status Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	204

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SAMBUTAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh....

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya akhirnya Penyusunan/Pembuatan Profil Gender Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 akhirnya bisa terwujud.

Sebagaimana Undang-undang Dasar 1945 bahwa semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan, sehingga bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar selanjutnya Indonesia telah melaksanakan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan konvensi hak anak. Untuk itu Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI telah meluncurkan program unggulan Three Ends yaitu meliputi 1. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak 2. Akhiri perdagangan manusia 3. Akhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasioanal (RPJPN) tahun 2005-2025 yang dijabarkan dalam RPJMD Provsu 2013-2018. Dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan serta memantau pelaksanaan berbagai program/kegiatan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk mengintegrasikan pengalaman, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan kaum laki-laki dan perempuan ke dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan sebagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender diberbagai aspek pembangunan.

Melalui profil ini digambarkan tentang kondisi secara umum laki-laki dan perempuan diberbagai bidang pembangunan khususnya bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, hukum dan sosial budaya, politik dan pengambilan keputusan serta kekerasan melalui profil ini dapat dilihat sejauh mana peran serta laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, apakah memperoleh akses yang sama, serta dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara adil.

Profil ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan perencanaan kebijakan program yang responsif gender dan peduli anak, terkait pencapaian kualitas hidup manusia khususnya masyarakat Sumatera Utara.

Akhirnya kepada berbagai pihak terutama Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara besertanya jajarannya diucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi atas kerjasamanya dalam penyusunan/pembuatan profil gender ini.

Waasalamu'alikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Hj. NURLELA, SH, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621023 198602 2 001**

KATA PENGANTAR

United Nations Development Programme (UNDP) menyatakan dalam *Human Development Report* bahwa salah satu elemen penting dalam pembangunan manusia adalah pertumbuhan ekonomi yang terdistribusi secara adil baik antar generasi, antar etnis, antar jenis kelamin, maupun antar wilayah. Salah satu dimensi yang ditekankan oleh UNDP adalah kesetaraan gender. Dimensi ini juga menjadi salah satu komitmen global yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs) dalam rangka mencapai kemajuan yang nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dalam mengukur pembangunan gender sebagai salah satu ukuran pembangunan manusia, UNDP mengembangkan Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measure (GEM) melalui Human Development Report 1995. Berbagai keterbatasan terhadap penggunaan indeks-indeks tersebut mendorong UNDP memperluas pengukuran dalam mendefinisikan Ketimpangan Gender dalam Pertumbuhan Ekonomi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Melalui Human Development Report 2010, UNDP memperkenalkan Gender Inequality Index (GII) sebagai alat ukur kuantitatif yang memotret kehilangan pencapaian dalam kehidupan perempuan dalam 3 (tiga) dimensi yaitu kesehatan reproduktif, pemberdayaan, dan pekerjaan.

Di Indonesia, proses pembangunan wanita telah berlangsung dalam satu jangka masa yang panjang dari zaman kerajaan Hindu sehinggalah masa selepas kemerdekaan Indonesia. Ia bermula dengan munculnya perjuangan wanita secara perseorangan termasuklah oleh para ratu dan pahlawan wanita Indonesia dan kemudiannya perjuangan wanita secara berkumpulan. Selanjutnya dengan dibentuknya kementerian urusan wanita di Indonesia pada tahun 1978 kemudian dilanjutkan kementerian ini pada reformasi dan kabinet 2014 ini bernama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta semua di daerah Indonesia adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membantu percepatan dan peningkatan perempuan secara sistematis dengan kebijakan, program dan kegiatannya yang berguna bagi mencapai *gender equality and justice* (kesetaraan gender dan keadilan gender), walaupun perjuangan tersebut masih banyak ketimpangan disana sini untuk terus ditingkatkan di masa depan.

Profil gender disusun untuk keperluan pemetaan pembangunan gender di Provinsi Sumatera Utara dalam usaha meningkatkan peran gender di masa depan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara pada tahun 2017. Adapun tim penyusunan/pembuatan buku profil gender tersebut yaitu; Prof. Pujiati, M.Soc.Sc, Ph.D, Hariani Siregar, S.Sos, M.SP, Ahmad Dzaky Ridho, ST, Indah Permata Sari Siregar, S.E, Muhammad Reza Zulkarnain, ST yang telah dapat melaksanakannya dengan maksimal atas bantuan banyak pihak. Oleh sebab itu, tim penyusunan/pembuatan profil ini menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penyusunan/pembuatan profil ini, khususnya:

1. Gubernur Sumatera Utara
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
3. Sekretaris Lembaga Penelitian USU
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara
5. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
6. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Demikianlah kata pengantar ini semoga buku profil gender ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu, bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Serta pembangunan bangsa dalam usaha meningkatkan peran gender yang setara dan berkeadilan.

Medan, November 2017
An. Lembaga Penelitian
Universitas Sumatera Utara
Sekretaris,

Dr. Dra. Ir. Chairani Hanum, MS
NIP. 19610831 198803 2 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan keadilan gender sebagai salah satu syarat untuk mencapai hasil pembangunan yang berkeadilan gender dan membawa manfaat baik bagi laki-laki maupun perempuan. Salah satu syarat untuk mencapai pembangunan yang memperhatikan keadilan gender adalah adanya analisis gender terhadap masing-masing program pembangunan yang dilaksanakan di semua sektor pembangunan. Analisis ini hanya dapat dilaksanakan apabila para perancang program dan para pengambil keputusan memahami tentang keadilan gender dan penerapannya dalam program-program pembangunan serta selalu mengikuti isu-isu gender terbaru dalam masyarakat yang terus berkembang.

Konteks di atas mensyaratkan ketersediaan data yang dirinci menurut jenis kelamin dan kelompok umur, termasuk data dan statistik anak dengan analisis berdasarkan konteks perkembangan masing-masing daerah. Ketersediaan data tersebut sangat penting dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender, dan peduli anak. Dengan menggunakan statistik gender, pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan diharapkan dapat tepat sasaran dan tepat guna sehingga memberikan dampak yang setara bagi perempuan dan laki-laki.

Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi gender di Provinsi Sumatera Utara perlu dilakukan penyusunan profil gender sebagai salah satu cara yang paling efektif dalam memberikan gambaran tentang kondisi, permasalahan, kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan. Pembangunan sumber manusia yang dilaksanakan selama ini masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan baik dalam mendapatkan akses terhadap sumber daya pembangunan, kesempatan dalam berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pengambilan keputusan, kontrol pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya pembangunan yang telah dilaksanakan seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, hukum dan sosial budaya dan politik dan pengambilan keputusan di berbagai aspek lainnya.

Adapun dasar hukum pembuatan Profil Gender Provinsi Sumatera Utara 2017 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional
4. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 tentang penyelenggaraan data gender dan anak
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak nomor 5 tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem data gender dan anak
7. Peraturan Daerah No. 1 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provsu Tahun 2017
8. Peraturan Gubernur No. 4 tahun 2017 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provsu Tahun 2017.

Data gender harus menjadi bagian penting dalam pengelolaan data di Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, pengelolaan data yang dilakukan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus terpilah menurut jenis kelamin, sehingga dapat dilakukan analisis gender untuk mengetahui apakah ada perbedaan posisi dan kondisi atau status dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan.

Data dan informasi merupakan sesuatu yang tidak statis tetapi bersifat dinamis dan selalu berubah. Justru karena sifat dinamis dan selalu berubah itulah, maka data dan informasi harus selalu dievaluasi dan diperhatikan perubahannya dan dimutakhirkan kembali pada tahun 2017. Kegiatan pemutakhiran data gender menjadi sangat relevan dan strategis untuk mendukung perencanaan dan arah pembangunan gender ke depan di Sumatera Utara.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, sebagian besar proses pembangunan berada di tangan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, pemahaman tentang kondisi daerah setempat sangatlah diperlukan, khususnya dalam upaya pembangunan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur di berbagai bidang untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara. Data ini secara berkala perlu dianalisis untuk mendapatkan makna yang lebih lengkap tentang kondisi gender di Sumatera Utara. Profil Gender menggambarkan berbagai isu gender yang selama ini masih terabaikan atau belum digarap secara optimal khususnya di wilayah yang masih tertinggal.

Dalam sistem perencanaan nasional, isu-isu gender di daerah juga menggambarkan permasalahan nasional yang harus ditindaklanjuti secara komprehensif dan berkesinambungan oleh daerah. Oleh karena itu, profil hasil analisis yang dilakukan di tingkat Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara akan menjadi input yang sangat berharga dalam perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, data dan informasi kesenjangan gender dapat digunakan untuk mengintegrasikan gender ke dalam berbagai sektor pembangunan, antara lain sektor strategis ekonomi, pendidikan, sosial budaya, hukum, politik, dan kesehatan. Ketersediaan fakta, data, dan informasi kesenjangan gender, berupa data terpilah dan fakta kesenjangan gender di berbagai sektor pembangunan juga sangat dibutuhkan karena dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi dan posisi laki-laki serta perempuan.

Data gender harus menjadi bagian penting dalam pengelolaan data di Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, pengelolaan data yang dilakukan setiap OPD harus terpilah menurut jenis kelamin, sehingga dapat dilakukan analisis gender untuk mengetahui apakah ada perbedaan posisi dan kondisi atau status dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan penyusunan Profil Gender di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk menyusun indikator-indikator penting dalam pembangunan gender dalam sebuah media sehingga dapat dibaca dan dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan serta menjadi masukan untuk perancangan program kegiatan.
2. Melakukan analisis terhadap indikator-indikator penting tersebut untuk menemukan isu-isu prioritas dalam pembangunan di Sumatera Utara khususnya data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur, statistik gender dan

isu-isu prioritas terkait pembangunan gender, pemberdayaan perempuan di daerah.

1.3. Sumber Data

Data yang diperoleh merupakan fakta maupun data statistik gender di 33 Kabupaten/ Kota, yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara, yang disajikan dalam bentuk data kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, hukum, sosial budaya dan kekerasan terhadap perempuan. Data tersebut merupakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara dan BPS Provinsi Sumatera Utara. Data-data yang telah diperoleh dibawa ke Forum Group Discussion (FGD) dengan dihadiri oleh perwakilan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provsu untuk meminta masukan terhadap kekurangan data yang sudah diperoleh. Hasil Forum Group Discussion (FGD) akan memperkaya data-data yang akan dianalisis.

1.4. Metodologi Penelitian

Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian ilmu sosial dengan cara mendapatkan data kuantitatif dan kualitatif di lapangan dengan mengambil data SUMUT dalam angka melalui BPS Sumut dan OPD yang berkaitan dengan profil gender di Sumatera utara tentang data kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan dan sebagainya

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data tertulis dari data dokumen dan peristiwa perilaku gender yang dapat diamati dan dianalisis mengikuti kaidah saintifik.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH

2.1. Geografi

Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Sumatera berbatasan dengan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam di bagian Utara dan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau di bagian Selatan. Provinsi Sumatera Utara secara geografis terletak antara 1°- 4° Lintang Utara dan 98°-100° Bujur Timur serta diapit oleh lautan India di bagian Barat dan Selat Malaka di bagian Timur. Luas Provinsi Sumatera Utara sekitar 71.680 Km² dengan sebagian besar pegunungan di bagian Barat dan dataran di bagian Timur. Dengan kemiringan semacam ini letak provinsi diatas permukaan laut berjarak cukup ekstrim dengan minimum 0-4 M diatas permukaan laut di Kota Tanjung Balai dan 0-1915 M diatas permukaan laut di Kabupaten Tapanuli Selatan.

2.2. Sejarah

Pada Zaman Pemerintahan Belanda, Sumatera merupakan suatu pemerintahan yang bernama *Gouvernement van Sumatera*, yang meliputi seluruh Sumatera, di kepalai oleh seorang *Gouverneur* berkedudukan di Medan. Sumatera terdiri dari daerah-daerah administratif yang dinamakan Keresidenan. Pada awal Kemerdekaan Republik Indonesia, Sumatera tetap merupakan suatu kesatuan pemerintahan yaitu Provinsi Sumatera yang dikepalai oleh seorang Gubernur dan terdiri dari daerah-daerah Administratif Keresidenan yang dikepalai oleh seorang Residen.

Pada sidang I Komite Nasional Daerah (K.N.D) Provinsi Sumatera, mengingat kesulitan-kesulitan perhubungan ditinjau dari segi pertahanan, diputuskan untuk membagi Provinsi Sumatera menjadi 3 sub Provinsi yaitu sub Provinsi Sumatera Utara (yang terdiri dari Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur dan Keresidenan Tapanuli), sub Provinsi Sumatera Tengah, dan sub Provinsi Sumatera Selatan. Dalam perkembangan selanjutnya melalui Undang-undang No.10 Tahun 1948 tanggal 15 april 1948, Pemerintah menetapkan Sumatera menjadi 3 Provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu :

1. Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli.

2. Provinsi Sumatera Tengah yang meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi.
3. Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi Keresidenan Bengkulu, Palembang, Lampung, dan Bangka Belitung.

Dengan mendasarkan kepada Undang-undang No.10 Tahun 1948, atas usul Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan suratnya tanggal 16 Pebruari 1973 No. 4585/25, DPRD Tingkat I Sumatera Utara dengan keputusannya tanggal 13 Agustus 1973 No. 19/K/1973 telah menetapkan bahwa hari jadi Provinsi Sumatera Daerah Tingkat I Sumatera Utara adalah tanggal 15 April 1948 yaitu tanggal ditetapkannya UU No. 10 tahun 1948 tersebut.

Pada awal tahun 1949 berkaitan dengan meningkatnya serangan Belanda, diadakanlah reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Pada waktu itu, keadaan memerlukan suatu sistem pertahanan yang lebih kokoh dan sempurna. Oleh karena itu perlu dipusatkan alat-alat kekuatan sipil dan militer dalam tiap-tiap Daerah Militer Istimewa yang berada dalam suatu tangan yaitu Gubernur Militer. Sehingga penduduk sipil dan militer berada dibawah kekuasaan satu pemerintah.

Perubahan demikian ini ditetapkan dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I tanggal 16 Mei 1949 No. 21/Pem/ P.D.R.I yang diikuti Keputusan Pemerintah Darurat R.I tanggal 17 Mei 1949 No. 22/ Pem/ P. D. R. I jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan.

Gubernur yang bersangkutan diangkat menjadi komisaris dengan tugas-tugas memberi pengawasan dan tuntutan terhadap pemerintahan, baik sipil maupun militer. Selanjutnya dengan intruksi Dewan Pembantu dan Penasehat Wakil Perdana Menteri tanggal 15 September 1949, Sumatera Utara dibagi menjadi Daerah Militer Istimewa yaitu Aceh dan Tanah Karo diketuai oleh Gubernur Militer Tgk. M. Daud Beureuen dan Tapanuli/ Sumatera Timur oleh Gubernur Militer Dr. F. L Tobing.

Selanjutnya, dengan ketetapan Pemerintah Darurat R.I dalam bentuk Peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 17 Desember 1949 No.8/Des/W.K.P.M dibentuklah Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/ Sumatera Timur. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950, Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 17 Agustus 1949 No.8/Des/W.K.P.M tahun 1949 tersebut dicabut dan kembali dibentuk Provinsi Sumatera Utara dengan daerah yang meliputi daerah Keresidenan Aceh, Sumatera

Timur, dan Tapanuli. Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950, pada waktu RIS, ditetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas beberapa daerah-daerah Provinsi, yaitu:

1. Jawa Barat
2. Jawa Tengah
3. Jawa Timur
4. Sumatera Utara
5. Sumatera Tengah
6. Sumatera Selatan
7. Kalimantan
8. Sulawesi
9. Maluku
10. Sunda Kecil

Pada tanggal 7 Desember 1956 diundangkanlah Undang-undang No 24 Tahun 1956 yaitu Undang-undang tentang pembentukan daerah otonom Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 1 Undang- undang No.24 Tahun 1956 ini menyebutkan :

1. Daerah Aceh yang meliputi Kabupaten-kabupaten: Aceh Besar, Aceh Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Selatan, Kota Besar Kutaraja, daerah-daerah tersebut dipisahkan dari lingkungan Daerah Otonom Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 1950 sehingga daerah-daerah tersebut menjadi daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan nama Provinsi Aceh.
2. Provinsi Sumatera Utara tersebut dalam ayat (1) yang wilayah nya telah dikurangi dengan bagian-bagian yang terbentuk sebagai daerah otonom Provinsi Aceh, tetap disebut Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1956, Undang-undang Darurat No.8 Tahun 1956, Undang-undang Darurat No.9 Tahun 1956, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.4 Tahun 1964, Provinsi Sumatera Utara terdiri 17 Kabupaten/Kota. Tetapi dengan terbitnya Undang-undang No.12 Tahun 1998, tentang pembentukan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dan Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) serta Undang-undang No.4 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padangsidempuan, Undang-undang No. 9 tahun 2003 tentang

pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, serta Undang-undang No. 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai, dan tahun 2007 dibentuk Kabupaten Batu Bara melalui Undang-undang No. 5 Tahun 2007, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2007 disahkan Undang-undang No. 37 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara, Undang-undang No. 38 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas. Pada tahun 2008 kembali diterbitkan Undang-undang No. 22 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Undang-undang nomor 23 tahun 2008 tentang pembentukan Labuhanbatu Utara, Undang-undang 45 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Nias Utara, Undang-undang No 46 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Nias Barat dan undang-undang No. 47 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Gunung Sitoli, dengan demikian wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Juli 2009 sudah menjadi 25 Kabupaten dan 8 Kota. Adapun Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Wilayah Kabupaten :

1. Asahan
2. Batubara
3. Dairi
4. Deli serdang
5. Humbang Hasundutan
6. Karo
7. Labuhan Batu
8. Labuhanbatu Selatan
9. Labuhanbatu Utara
10. Langkat
11. Mandailing Natal
12. Nias
13. Nias Barat
14. Nias Selatan
15. Nias Utara
16. Padang Lawas
17. Padang Lawas Utara
18. Pakpak Bharat
19. Samosir

20. Serdang Bedagai
21. Simalungun
22. Tapanuli Selatan
23. Tapanuli Tengah
24. Tapanuli Utara
25. Toba Samosir

Wilayah Kota :

1. Binjai
2. Gunungsitoli
3. Medan
4. Padangsidempuan
5. Pematangsiantar
6. Sibolga
7. Tanjung Balai
8. Tebing Tinggi

Dalam perkembangan berikutnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah maka kelembagaan pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengalami perubahan. Berdasarkan PP No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh keluarnya Perda No. 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari 40 OPD, yaitu :

1. Sekretariat Daerah (terdiri dari 9 Biro)
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Inspektorat Wilayah Provinsi
4. Bappeda
5. BKD
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7. Badan Penelitian dan Pengembangan
8. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13. Badan Penghubung Daerah Provinsi

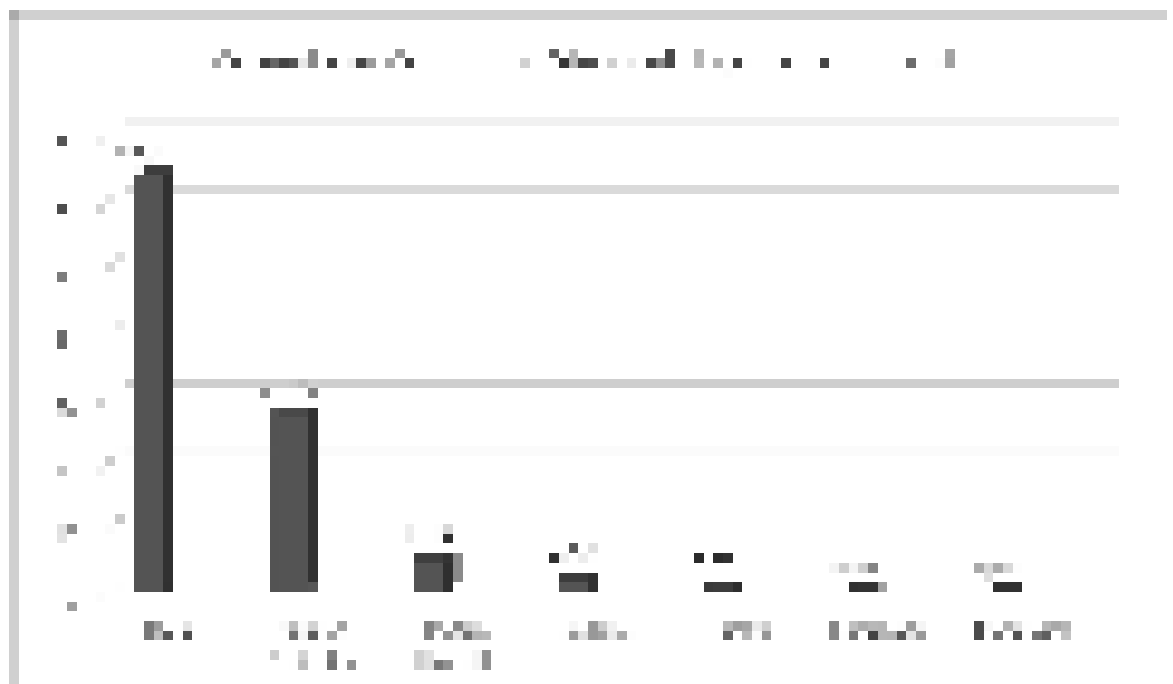
14. Dinas Pendidikan
15. Dinas Kesehatan
16. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
17. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
18. Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang
19. Satuan Polisi Pamong Praja
20. Dinas Sosial
21. Dinas Tenaga Kerja
22. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
24. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
25. Dinas Lingkungan Hidup
26. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
27. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
28. Dinas Perhubungan
29. Dinas Komunikasi dan Informatika
30. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
31. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu Satu Pintu
32. Dinas Pemuda dan Olahraga
33. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
34. Dinas Perpustakaan dan Arsip
35. Dinas Kelautan dan Perikanan
36. Dinas Kehutanan
37. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
38. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
39. Dinas Perkebunan
40. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

2.3. Sosial Budaya

Provinsi Sumatera Utara secara administratif tahun 2016 terbagi dalam 25 Kabupaten dan 8 Kota, 443 Kecamatan, dan 6.112 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 14.102.911 jiwa dan pusat pemerintahan provinsi terletak di Kota Medan yang berpenduduk sekitar 2.229.408 jiwa pada tahun 2016.

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pegunungan/dataran tinggi, dataran rendah dan daerah pantai. Keragaman wilayah tersebut juga menggambarkan keanekaragaman suku bangsa dan agama yang dianut penduduknya. Namun dalam sumpah muda mengikrarkan kesatuan dan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, mencerminkan kekayaan khasanah sosial dan budaya tidak menyebabkan perpecahan tetapi mempererat persatuan dalam satu bangsa yaitu bangsa Indonesia.

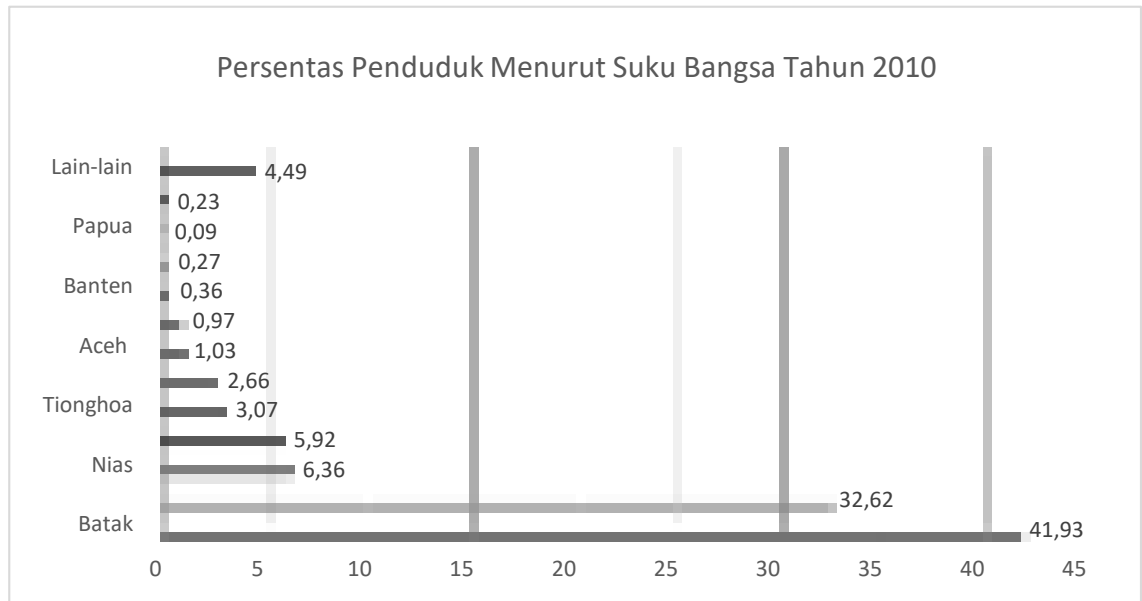
Agama Islam merupakan jumlah terbesar yang dianut oleh penduduk Sumatera Utara, yaitu 63,91 persen., selanjutnya Kristen Protestan 27,86 persen, Kristen Khatolik 5,42 persen, Buddha 2,43 persen, Hindu 0,35 persen, Konghucu 0,02 persen dan Parmalim 0,01 persen seperti terlihat pada Gambar 2.1. Dilihat secara geografis penganut agama islam umumnya mendiami daerah (Kabupaten/Kota) yang berada di sepanjang Pantai Timur dan sebagian dataran tinggi, sedangkan penduduk yang menganut agama Kristen (Khatolik dan Protestan) sebagian besar mendiami wilayah Pantai Barat dan wilayah dataran tinggi.



Gambar 2.1. Grafik Persentase Penduduk Menurut Agama Tahun 2015

Sedangkan penganut agama Hindu dan Buddha biasanya berada di daerah kota, baik ibukota kabupaten maupun ibukota provinsi. Selain keragaman agama di Sumatera Utara terdapat juga keragaman suku bangsa yang juga merupakan potensi daerah. Menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2010 Provinsi Sumatera Utara didiami

oleh beberapa suku besar yaitu suku Jawa, Batak, Nias, Melayu, Tionghoa, Minang, Aceh, Banjar, Banten, Sunda Papua, Asal Luar Negeri, Lain-lain. Suku bangsa terbesar adalah Batak sebesar 41,93 persen, Jawa sebesar 32,63 persen, Nias 6,36 persen, Melayu 5,92 persen, Tionghoa 3,07 persen, Minang 2,66 persen, Aceh 1,03 persen, Banjar 0,97 persen, Banten 0,36 persen, Sunda 0,27 persen, Papua 0,09 persen, Asal luar Negeri 0,23 persen dan lain lain 4,49 persen.



Gambar 2.2. Grafik Persentase Penduduk Menurut Suku Bangsa Tahun 2010

BAB III

JUMLAH DAN KOMPOSISI PENDUDUK

Jumlah komposisi penduduk adalah : pengelompokan atau susunan penduduk suatu negara atau suatu wilayah berdasarkan kriteria- kriteria tertentu. Contoh komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, pendidikan, bahasa, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Gambaran mengenai komposisi penduduk perlu dikaji atau dipelajari karena berbagai alasan, antara lain, karena setiap penduduk pasti memiliki usia dan jenis kelamin yang berbeda sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda pula. Pemerintah dapat merancang kegiatan atau perencanaan yang benar-benar sesuai dengan kemampuan penduduk. Pemerintah juga dapat menata kebutuhan sarana dan prasarana kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang disesuaikan dengan kebutuhan penduduknya. Potensi penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristik atau ciri demografis, sosial maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. Jadi membahas sumber daya manusia berarti membahas penduduk dengan segala potensi atau kemampuannya. Potensi manusia menyangkut dua aspek yaitu aspek kuantitas dan kualitas. Karakteristik demografi merupakan aspek kuantitatif sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk menggambarkan jumlah dan pertumbuhan penduduk, penyebaran penduduk dan komposisi penduduk.

Karakteristik sosial dan ekonomi penduduk berhubungan dengan kualitas (mutu) sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara, sangat ditentukan oleh kualitas penduduk yang ada baik secara fisik maupun mental. Sumber daya manusia atau penduduk menjadi aset tenaga kerja yang efektif untuk menciptakan kesejahteraan.

3.1. Jumlah Penduduk

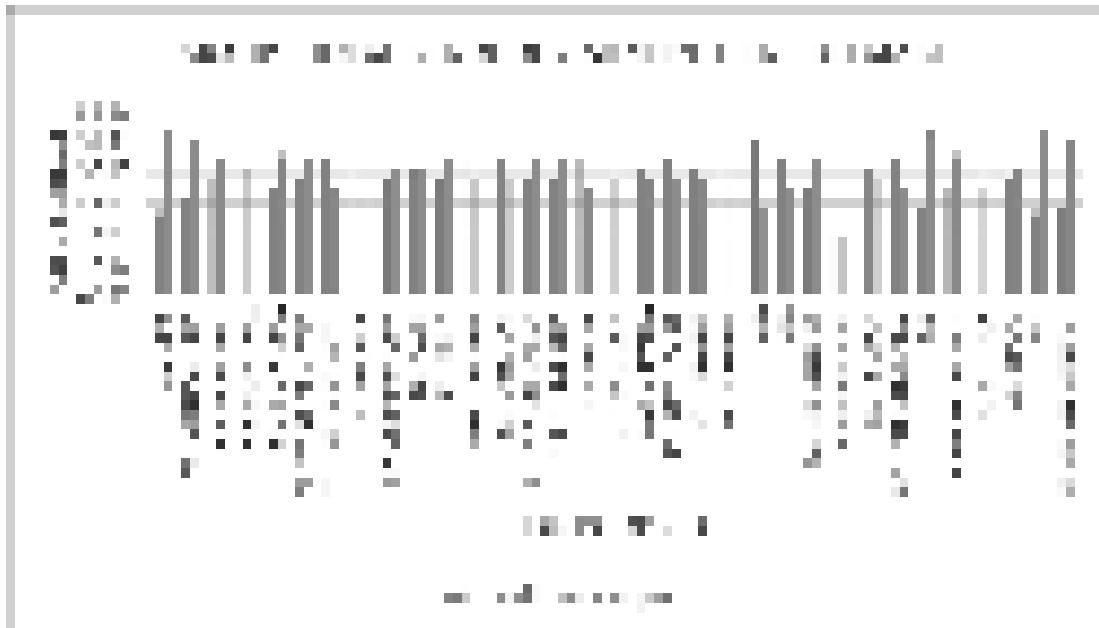
Tabel 3.1. Jumlah Dan Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK			PERSENTASE PENDUDUK		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NIAS	66 682	70 215	136 897	48,71	51,29	100,00
2	MANDAILING NATAL	213 682	221 621	435 303	49,09	50,91	100,00
3	TAPANULI SELATAN	137 590	139 299	276 889	49,69	50,31	100,00
4	TAPANULI TENGAH	179 194	177 724	356 918	50,21	49,79	100,00
5	TAPANULI UTARA	146 104	149 509	295 613	49,42	50,58	100,00
6	TOBA SAMOSIR	89 688	91 006	180 694	49,64	50,36	100,00
7	LABUHANBATU	237 719	232 792	470 511	50,52	49,48	100,00
8	ASAHAN	357 900	354 784	712 684	50,22	49,78	100,00
9	SIMALUNGUN	425 794	428 695	854 489	49,83	50,17	100,00
10	DAIRI	140 200	140 410	280 610	49,96	50,04	100,00
11	KARO	196 898	199 700	396 598	49,65	50,35	100,00
12	DELI SERDANG	1 043 114	1 029 407	2 072 521	50,33	49,67	100,00
13	LANGKAT	514 211	506 997	1 021 208	50,35	49,65	100,00
14	NIAS SELATAN	154 519	156 800	311 319	49,63	50,37	100,00
15	HUMBANG HASUNDUTAN	91 789	93 126	184 915	49,64	50,36	100,00
16	PAKPAK BHARAT	23 393	22 999	46 392	50,42	49,58	100,00
17	SAMOSIR	61 904	62 592	124 496	49,72	50,28	100,00
18	SERDANG BEDAGAI	306 620	304 286	610 906	50,19	49,81	100,00
19	BATU BARA	203 689	201 299	404 988	50,30	49,70	100,00
20	PADANG LAWAS UTARA	129 514	128 293	257 807	50,24	49,76	100,00
21	PADANG LAWAS	132 181	131 603	263 784	50,11	49,89	100,00
22	LABUHANBATU SELATAN	163 390	156 991	320 381	51,00	49,00	100,00
23	LAB. BATU UTARA	179 105	175 380	354 485	50,53	49,47	100,00
24	NIAS UTARA	66 816	68 197	135 013	49,49	50,51	100,00
25	NIAS BARAT	40 805	40 805	85 291	47,84	47,84	100,00
26	SIBOLGA	43 515	43 274	86 789	50,14	49,86	100,00
27	TANJUNGBALAI	85 213	83 871	169 084	50,40	49,60	100,00
28	PEMATANGSIANTAR	121 684	127 821	249 505	48,77	51,23	100,00

29	TEBING TINGGI	78 582	80 320	158 902	49,45	50,55	100,00
30	MEDAN	1 101 020	1 128 388	2 229 408	49,39	50,61	100,00
31	BINJAI	133 692	134 209	267 901	49,90	50,10	100,00
32	PADANGSIDIMPUAN	103 709	109 208	212 917	48,71	51,29	100,00
33	GUNUNGSITOLI	67 410	70 283	137 693	48,96	51,04	100,00
	SUMATERA UTARA	7 037 326	7 065 585	14 102 911	49,90	50,07	100,00

Sumber data : BPS

Berdasarkan data tabel 3.1, penduduk Sumatera Utara lebih banyak perempuan dibandingkan dengan jumlah laki-laki 7.037.326 (49,90 %) dan perempuan 7.061.904 (50,07 %).



Gambar 3.1. Grafik Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara

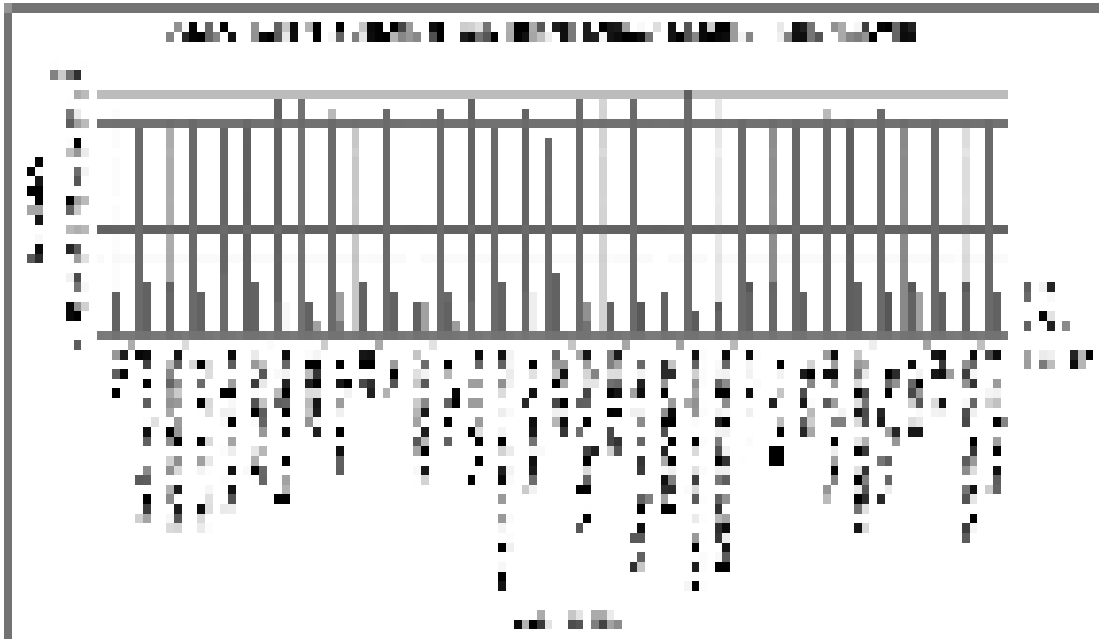
Tabel 3.2 Jumlah Dan Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	KAB./KOTA	JUMLAH KEPALA RUMAH TANGGA					
		L	%	P	%	L+P	% L+P
1	Nias	23603	84.01	4493	15.99	28096	0.85
2	Mandailing Natal	79903	78.41	22007	21.59	101910	3.09

3	Tapanuli Selatan	51857	80.92	12230	19.08	64087	1.94
4	Tapanuli Tengah	63434	82.81	13167	17.19	76601	2.32
5	Tapanuli Utara	53107	77.74	15209	22.26	68316	2.07
6	Toba Samosir	35581	80.41	8667	19.59	44248	1.34
7	Labuhan Batu	93208	87.92	12804	12.08	106012	3.21
8	Asahan	145853	87.64	20577	12.36	166430	5.04
9	Simalungun	181086	83.04	36979	16.96	218065	6.61
10	Dairi	53754	80	13435	20	67189	2.03
11	Karo	89858	84.1	16984	15.9	106842	3.24
12	Deli Serdang	422621	87.05	62867	12.95	485488	14.73
13	Langkat	213160	84.93	37811	15.07	250971	7.61
14	Nias Selatan	56444	87.02	8420	12.98	64864	1.96
15	Humbang Hasundutan	32790	78.2	9140	21.8	41930	1.27
16	Pakpak Barat	8703	83.95	1664	16.05	10367	0.31
17	Samosir	22671	75.55	7336	24.45	30007	0.91
18	Serdang Bedagai	129752	87.12	19190	12.88	148942	4.51
19	Batu Bara	80761	86.97	12098	13.03	92859	2.81
20	Padang Lawas Utara	52141	86.94	7832	13.06	59973	1.81
21	Padang Lawas	49928	81.99	10972	18.01	60900	1.84
22	Labuhan Batu Selatan	68964	90.92	6890	9.08	75854	2.30
23	Labuhan Batu Utara	72286	88.07	9793	11.93	82079	2.49
24	Nias Utara	22449	80.93	5289	19.07	27738	0.84
25	Nias Barat	12893	80.97	3031	19.03	15924	0.48
26	Sibolga	15359	82.47	3265	17.53	18624	0.56
27	Tanjung Balai	30062	83.16	6089	16.84	36151	1.09
28	Pematang Siantar	46629	79.94	11704	20.06	58333	1.76
29	Tebing Tinggi	32116	84.57	5860	15.43	37976	1.15
30	Medan	413999	80.94	97516	19.06	511515	15.52
31	Binjai	50964	82.85	10554	17.15	61518	1.86
32	Padang Sidempuan	38687	81.08	9026	18.92	47713	1.44
33	Gunung Sitoli	23152	82.16	5027	17.84	28179	0.85
SUMATERA UTARA		2.767,775	83.97	527.926	16.03	3295701	100

Sumber data: BPS

Berdasarkan data diatas tabel 3.2 bahwa kepala keluarga masih didominasi laki-laki dibandingkan perempuan yaitu 2.767,775 (83.97%) sedangkan perempuan 527.926 (16.03%). Ini didasari sistem budaya patriaki yaitu bahwa laki-laki/bapak berkuasa atas keluarga dan garis keturunan keluarga dengan membawa garis keturunan laki-laki(bapak) dan kemungkinan juga sedikitnya perempuan sebagai ibu tunggal (*singel parent*) dalam sebuah keluarga.



Gambar 3.2. Grafik Jumlah dan Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin

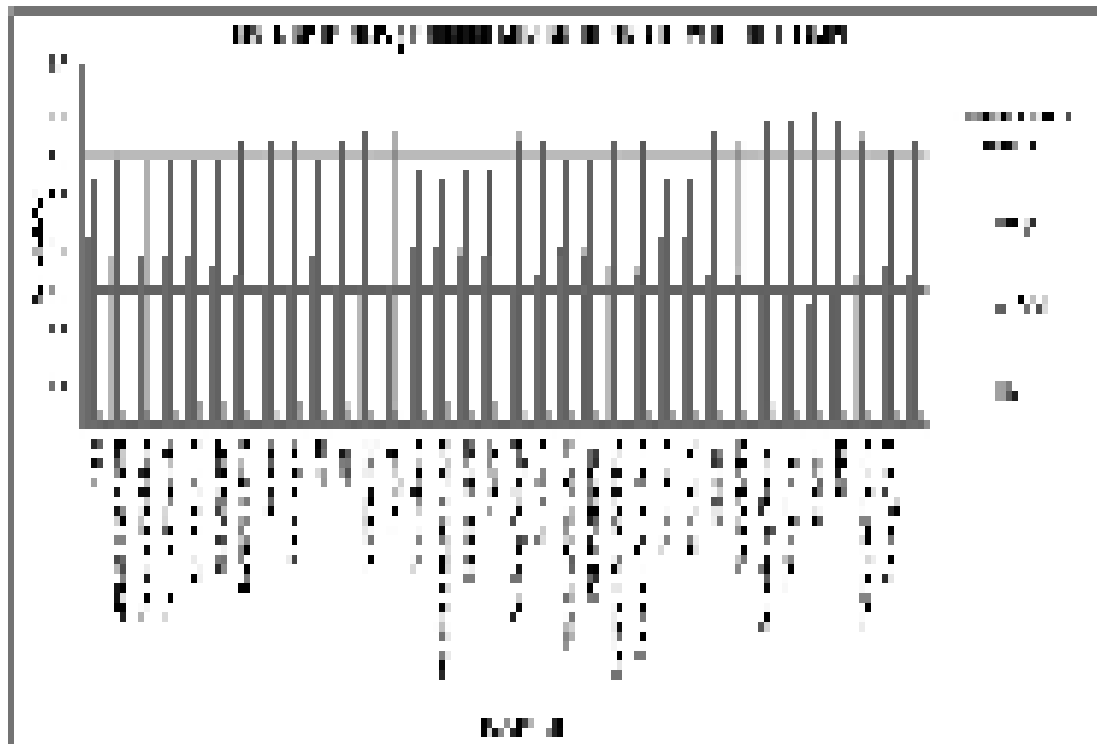
**Tabel 3.3 Jumlah (Persentase) Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2016**

No	KAB./KOTA	LAKI-LAKI				PEREMPUAN				LAKI-LAKI+PEREMPUAN			
		KELOMPOK UMUR			JUMLAH	KELOMPOK UMUR			JUMLAH	KELOMPOK UMUR			JUMLAH
		0-14	15-64	65+		0-14	15-64	65+		0-14	15-64	65+	
1	Nias	42.25	54.83	2.92	100	38.54	58.33	3.14	100	40.34	56.62	3.03	100
2	Mandailing Natal	36.62	60.13	3.25	100	34.13	61.06	4.82	100	35.35	60.6	4.05	100
3	Tapanuli Selatan	36.75	59.93	3.32	100	34.23	60.62	5.15	100	35.48	60.28	4.24	100
4	Tapanuli Tengah	37.99	59.14	2.87	100	36.71	58.7	4.59	100	37.35	58.92	3.72	100
5	Tapanuli Utara	37.01	58.29	4.71	100	34.37	57.38	8.25	100	35.67	57.83	6.5	100
6	Toba Samosir	35.32	59.42	5.26	100	33.25	58.72	8.04	100	34.28	59.07	6.66	100
7	Labuhan Batu	33.7	63.41	2.9	100	33.31	63.13	3.56	100	33.51	63.27	3.22	100
8	Asahan	32.23	63.73	4.04	100	31.44	63.61	4.95	100	31.84	63.67	4.49	100
9	Simalungun	31.39	63.88	4.74	100	29.82	63.77	6.41	100	30.6	63.83	5.58	100
10	Dairi	37.23	58.83	3.95	100	35.2	58.72	6.08	100	36.21	58.77	5.01	100
11	Karo	32.18	63.47	4.35	100	30.4	63.21	6.39	100	31.29	63.34	5.38	100
12	Deli Serdang	30.87	66	3.13	100	29.91	66.34	3.75	100	30.39	66.17	3.44	100
13	Langkat	30.81	65.1	4.09	100	30.02	65.16	4.81	100	30.42	65.13	4.45	100
14	Nias Selatan	39.94	57.6	2.46	100	37.86	59.89	2.26	100	38.89	58.75	2.36	100
15	Humbang Hasundutan	39.44	55.27	5.3	100	36.87	54.56	8.57	100	38.14	54.91	6.94	100

16	Pakpak Barat	38.79	57.67	3.54	100	38.03	57.28	4.7	100	38.41	57.48	4.11	100
17	Samosir	36.87	57.81	5.32	100	34.29	57.41	8.3	100	35.57	57.61	6.82	100
18	Serdang Bedagai	31.42	64.38	4.2	100	30.24	64.38	5.39	100	30.83	64.38	4.79	100
19	Batu Bara	33.17	62.95	3.88	100	32.24	62.79	4.96	100	32.71	62.87	4.42	100
20	Padang Lawas Utara	39.03	58.1	2.87	100	37.85	58.54	3.6	100	38.44	58.32	3.23	100
21	Padang Lawas	38.79	58.46	2.75	100	37.53	59.15	3.32	100	38.16	58.81	3.03	100
22	Labuhan Batu Selatan	35.49	62.38	2.13	100	35.37	62.16	2.46	100	35.43	62.28	2.29	100
23	Labuhan Batu Utara	34.3	62.33	3.37	100	33.91	62.11	3.98	100	34.11	62.22	3.67	100
24	Nias Utara	41.48	55.53	3	100	37.8	58.88	3.31	100	39.62	57.22	3.16	100
25	Nias Barat	41.59	55.46	2.96	100	37.07	59.55	3.39	100	39.23	57.59	3.18	100
26	Sibolga	32.54	65.16	2.3	100	31.67	64.43	3.9	100	32.11	64.8	3.1	100
27	Tanjung Balai	33.99	63.1	2.91	100	33.13	62.83	4.04	100	33.56	62.97	3.47	100
28	Pematang Siantar	28.92	66.72	4.36	100	26.81	67.09	6.1	100	27.84	66.91	5.25	100
29	Tebing Tinggi	29.37	66.62	4.02	100	27.74	67.14	5.12	100	28.55	66.88	4.57	100
30	Medan	27.02	69.56	3.42	100	25.22	70.57	4.21	100	26.11	70.07	3.82	100
31	Binjai	28.41	67.79	3.8	100	27.01	68.48	4.5	100	27.71	68.14	4.15	100
32	Padang Sidempuan	32.67	64.52	2.81	100	30.28	65.78	3.95	100	31.44	65.16	3.39	100
33	Gunung Sitoli	35.95	61.39	2.66	100	32.36	63.75	3.89	100	34.11	62.6	3.29	100
SUMATERA UTARA		32.55	63.86	3.59	100	31.07	64.25	4.68	100	31.81	64.06	4.14	100

Sumberdata: BPS

Berdasarkan tabel 3.3, maka jumlah penduduk di Sumatera Utara menurut kelompok umur yaitu di usia produktif 15-64 dengan jumlah persentase yaitu 64.06. Sedangkan dari segi jenis kelamin lebih banyak perempuan di usia produktif yaitu 64.25 dibandingkan laki-laki hanya 63.86. Sedangkan Kabupaten/kota jumlah penduduk yang tertinggi dari usia produktif adalah di kota Medan 70.07 dibandingkan kota atau kabupaten lainnya yang terdapat di Sumatera Utara.



Gambar 3.3. Grafik Jumlah (Persentase) Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin

Tabel 3.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2016

No	KAB./KOTA	IPM (2016)	Peringkat	IPG (2015)	Peringkat	IDG (2015)	Peringkat
1	Nias	59,75	31	89.01	23	51.70	32
2	Mandailing Natal	64,55	29	92.61	15	64.80	12
3	Tapanuli Selatan	68,04	20	91.50	16	67.61	10
4	Tapanuli Tengah	67,27	22	95.29	10	60.93	19
5	Tapanuli Utara	71,96	10	99.16	2	65.34	11
6	Toba Samosir	73,61	4	98.13	4	62.75	15
7	Labuhan Batu	70,50	12	90.73	20	75.90	1
8	Asahan	68,71	18	90.82	17	61.63	17
9	Simalungun	71,48	11	92.84	14	64.52	13
10	Dairi	69,61	15	98.57	3	61.58	18
11	Karo	73,29	8	95.95	9	75.59	2
12	Deli Serdang	73,51	7	90.75	19	60.00	21
13	Langkat	69,13	16	88.42	25	56.00	30
14	Nias Selatan	59,14	32	86.89	28	57.45	28
15	Humbang	66,56	25	97.44	7	59.22	23
16	Pakpak Barat	65,81	28	99.63	1	53.91	31
17	Samosir	68,82	17	96.17	8	75.50	3
18	Serdang Bedagai	68,77	19	87.69	26	67.65	9
19	Batu Bara	66,69	26	81.29	32	68.33	8
20	Padang Lawas	68,05	21	86.24	29	59.65	22
21	Padang Lawas	66,23	27	85.95	30	57.56	27
22	Labuhan Batu	70,28	14	86.92	27	58.22	26
23	Labuhan Batu	70,26	13	89.47	22	46.77	33
24	Nias Utara	60,23	30	78.43	33	58.44	25
25	Nias Barat	59,03	33	84.56	31	70.04	6
26	Sibolga	72,00	9	97.46	6	73.80	4
27	Tanjung Balai	67,09	23	88.67	24	59.20	24
28	Pematang Siantar	76,90	2	95.18	11	73.29	5
29	Tebing Tinggi	73,58	5	93.45	12	56.82	29
30	Medan	79,34	1	93.16	13	60.54	20
31	Binjai	74,11	3	90.79	18	69.44	7
32	Padang Sidempuan	73,42	6	97.47	5	61.95	16
33	Gunung Sitoli	66,85	24	89.58	21	63.67	14
	PROVSU	70,00	10	90.96		66.83	

Sumber data: BPS

Berdasarkan tabel 3.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di peringkat 1 adalah kota Medan dengan jumlah 79,34 (Tahun 2016), sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) peringkat 1 adalah Kabupaten Tapanuli Utara dengan jumlah 99,16 (Tahun 2015), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tertinggi adalah dikabupaten Labuhan Batu dengan jumlah 75,90 (Tahun 2015)

BAB IV

PENDIDIKAN

Pendidikan telah menjadi sektor strategis dalam sistem dan program pembangunan suatu bangsa. Banyak negara telah menjadikan *leading sector*, sektor utama atau unggulan dalam program pembangunannya. Dari berbagai studi yang dilakukan, ternyata bahwa negara-negara yang menjadikan pendidikan sebagai *leading sector*, telah menjadi negara maju dan mampu menguasai pasar dunia.

Tujuan pembentukan Negara pada alinea empat Pembukaan UUD 1945 mengandung implikasi imperatif bagi pendidikan nasional yang harus menyiapkan seluruh lapisan bangsa, menyangkut proses alih generasi, yang cinta bangsa dan tanah air, peduli dan bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum, berkehidupan yang cerdas sebagai bangsa yang berjati diri yang mampu berkompetisi dan berkolaborasi dengan bangsa-bangsa lain di dunia, dan bertanggungjawab di dalam memelihara dan membangun perdamaian dan kedamaian hidup umat manusia. Pesan ini memberikan bahwa pembangunan pendidikan, untuk menyiapkan generasi bangsa secara berkelanjutan, harus membuat bangsa ini memiliki kemampuan melihat ke dalam (*inward looking*) dan melihat ke luar (*outward looking*), yang akan membangun bangsa ini dalam keseimbangan antara Nasionalisme dan Internasionalisasi atau globalisasi.

Pendidikan merupakan satu elemen yang penting untuk membentuk manusia yang berketerampilan dan produktif sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dengan pemerintah yang perlu berlangsung seumur hidup.

Kemiskinan ilmu yang menyelimuti perempuan akan membuatkan rakyatnya tertinggal dalam pembangunan di Indonesia dan khususnya Sumatera Utara. Oleh sebab itu untuk memajukan suatu bangsa, dibuka seluas-luasnya kesempatan kepada perempuan untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan.

Menurut Suryadi (1999) kebijaksanaan pendidikan tentu harus memperhitungkan perubahan masyarakat yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, agar semakin realistis dan sesuai dengan tantangan zaman yang terus berubah. Ki Hadjar Dewantara (1977) mengemukakan bahwa mendidik seorang anak merupakan mendidik rakyat yang akan menuju kepada kemerdekaan dirinya lahir

dan batin dan sebagai manusia merdeka bersandar hanya kepada kekuatan dirinya bukan orang lain.

Kewajiban Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun merupakan kewajiban pendidikan oleh seluruh rakyat Indonesia minimal harus mengikuti pendidikan wajib selama 9 tahun yaitu dari tingkat SD selama 6 tahun dan tingkat SMP selama 3 tahun sehingga jumlah 9 tahun sebagai jangka waktu pada 2 jenjang pendidikan yang harus diikuti segenap bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

1. Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah. Ini berarti peserta didik: anak siapapun, di manapun, termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus, berhak mengikuti pendidikan tanpa membayar, dan memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu (Pasal 5 Ayat (1) UU No. 20/2003).
2. Setiap sekolah harus segera dilengkapi dengan fasilitas pendidikan yang memadai, termasuk lapangan olah raga (sesuai dengan pasal-pasal dalam Bab VII PP No. 19/2005) dan kepada peserta didik diberikan (atau dipinjamkan) buku pelajaran dan buku tulis, terutama untuk mereka yang datang dari keluarga yang secara ekonomi tidak mampu. Di samping itu untuk daerah terpencil seperti Papua perlu dirintis sekolah berasrama.
3. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun harus mengakses seluruh anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, anak tak beruntung, populasi khusus, yang harus dilayani dengan diversifikasi program layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing, dan sekolah harus menyiapkan diversifikasi layanan secara inklusif.
4. Sebagai persiapan memasuki pendidikan menengah pada tingkat pendidikan dasar harus dirancang dengan sistematis sehingga hanya lulusan pendidikan dasar yang bersifat wajib, yang memenuhi syarat memasuki pendidikan menengah, dan yang tidak memenuhi syarat untuk masuk SMA dipersiapkan untuk memasuki SMK dan/atau latihan kerja (kursus) yang sifatnya jangka pendek untuk memasuki dunia kerja.

Adapun Standar Nasional Pendidikan yang harus diperhatikan pemerintah yang berguna bagi sekolah dan penyelenggara sekolah, masyarakat yaitu:

1. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional serta akreditasi tingkat kelayakan sekolah di seluruh Indonesia.

Evaluasi diperlukan untuk memperoleh gambaran nyata tentang mutu pelayanan pendidikan dalam sembilan komponen penyelenggaraan pendidikan yang tertuang dalam Pasal 2 PP No. 19/2005.

2. Pemerintah harus menyusun program dan melaksanakan secara konsisten program-program tersebut untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang ditetapkan dalam PP No. 19/2005 dengan urutan prioritas; guru, sarana dan prasarana, isi dan proses, penilaian, pembiayaan, pengelolaan dan yang terakhir kompetensi lulusan.

Secara umum pendidikan terbagi kedalam dua bahagian yaitu pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang didapat disekolah dimana ada guru sebagai pengajar atau disebut juga sebagai orang tua di luar rumah dan siswa sebagai pelajar. Sedangkan pendidikan non formal adalah pendidikan yang diajarkan dirumah oleh orang tua kepada anaknya untuk menjadikan seorang anak itu baik atau buruk sifatnya dan biasanya pendidikan non formal itu diikuti dengan pergaulan dilingkungan sekitar yang juga membentuk peribadi anak (Ulwan, 1998).

4.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin dan Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara

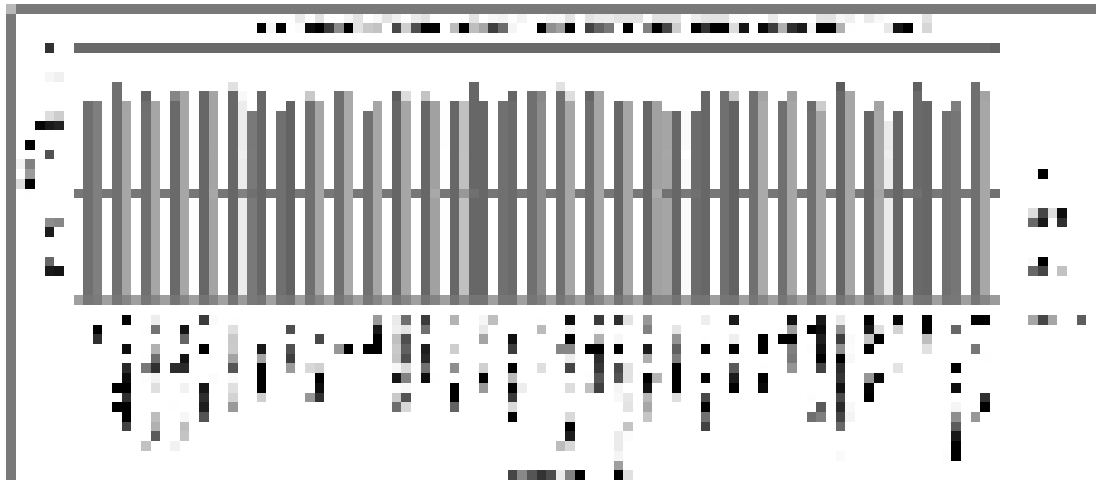
Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan penyangga utama keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Melalui pendidikan merupakan salah satu cara yang utama untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

Tabel 4.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

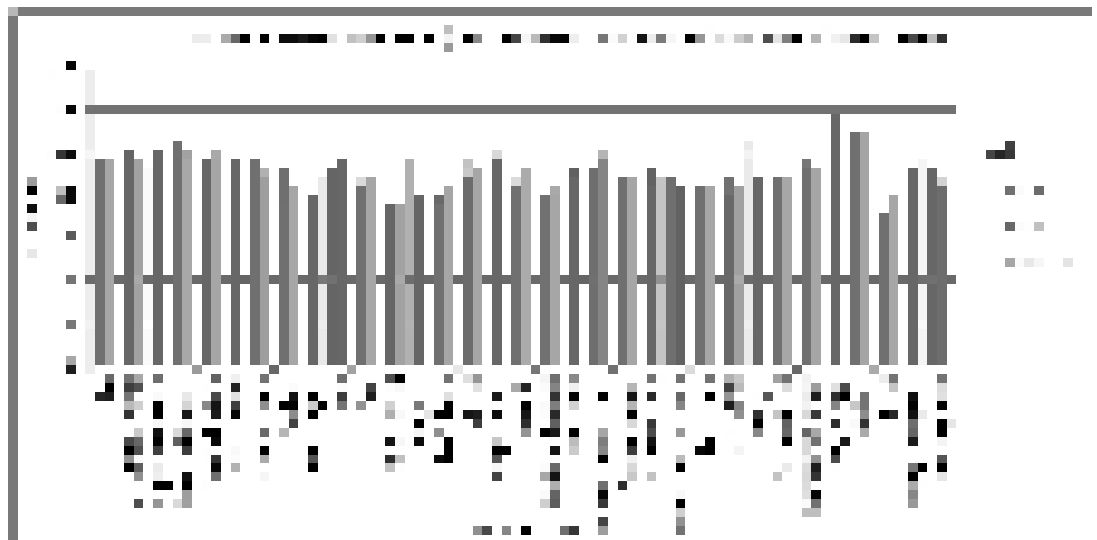
No	KAB./KOTA	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Nias	110.51	111.99	111.22	97.64	96.08	96.97	98.01	60.49	78.63
2	Mandailing Natal	120.14	105.92	112.58	95.81	99.77	97.74	67.28	77.55	72.38
3	Tapanuli Selatan	114.01	107.56	110.78	91.69	100.06	95.54	84.59	85.58	85.06
4	Tapanuli Tengah	113.06	117.24	115.02	105.41	98.07	101.95	80.86	90.87	85.73
5	Tapanuli Utara	112.85	116.54	114.56	101.66	96.79	99.4	97.53	109.05	102.49
6	Toba Samosir	108.24	118.63	113.25	83.28	95.48	89.21	114.63	102.5	109.93
7	Labuhan Batu	106.76	115.01	110.81	95.95	89.14	92.26	73.93	105.42	88.43
8	Asahan	106.77	112.07	109.29	93.73	77.77	85.59	89.38	91.45	90.31
9	Simalungun	113.25	109.41	111.41	98.07	81.2	90.04	95.95	100.13	98.11
10	Dairi	116.53	114.47	115.53	93.82	96.74	95.26	90.42	98.18	94.23
11	Karo	106.76	113.83	110.31	86.51	90.67	88.41	100.91	96.43	98.47
12	Deli Serdang	110.75	115.94	113.28	74.99	74.77	74.88	101.25	105.19	103.11
13	Langkat	112.59	113.33	112.93	97.64	79.99	88.48	83.56	99.12	91.14
14	Nias Selatan	108.97	109.75	109.34	78.65	88.49	82.98	78.14	68.9	73.67
15	Humbang Hasundutan	122.06	111.17	116.36	90.34	95.01	92.6	110.18	105.74	108.12
16	Pakpak Barat	112.69	113.91	113.27	88.38	98.97	94.13	80.43	90.5	84.78
17	Samosir	115.37	113.78	114.55	86.37	105.48	94.18	105.06	83.29	94.21
18	Serdang Bedagai	118.53	108.52	113.38	81.31	84.15	82.6	100.44	122.62	112.05
19	Batu Bara	113.81	117.51	115.58	83.87	91.1	87.3	99.32	104.96	102.2
20	Padang Lawas Utara	109.22	110.39	109.81	94.03	99.78	96.96	91.83	102.88	97.07
21	Padang Lawas	114.38	111.62	112.86	87	87.42	87.17	92.45	101.83	95.94
22	Labuhan Batu Selatan	106.37	104.23	105.36	85.81	93.26	89.63	83.76	97.1	89.67
23	Labuhan Batu Utara	106.64	116.63	111.64	89.98	83.18	86.77	109.42	100.41	104.81
24	Nias Utara	117.77	113.2	115.45	82.81	87.38	84.76	101.64	98.41	99.9
25	Nias Barat	117.48	113.38	115.47	80.9	89.01	84.93	110.37	102.12	106.12
26	Sibolga	112.68	114.99	113.89	104.05	89.39	96.29	89.6	114.15	99.48
27	Tanjung Balai	110.44	105.24	107.97	88.35	91.03	89.62	92.26	90.34	91.22
28	Pematang Siantar	113.6	122.91	118.17	96.19	92.29	94.17	94.82	105.39	99.98
29	Tebing Tinggi	111.61	105.5	108.69	92.25	116.56	103.08	99.51	108.7	104.21
30	Medan	98.51	103.64	101.01	109.76	108.7	109.21	77.2	85.29	81.12
31	Binjai	119.14	111.76	115.69	71.83	93.17	81.99	104.5	82.87	93.51
32	Padang Sidempuan	104.49	112.05	108.16	96.11	94.27	95.14	98.31	105.71	102.4
33	Gunung Sitoli	122.15	111.03	116.69	91.91	86.15	88.88	108.82	99.14	104.63
	SUMATERA UTARA	110.27	111.54	110.89	91.35	90.06	90.71	90.67	96.01	93.25
	- Perkotaan	108.66	110.8	109.7	91.2	91.64	91.42	91.92	94.54	93.2
	- Perdesaan	111.73	112.19	111.96	91.47	88.65	90.11	89.4	97.52	93.31

Sumber data: BPS

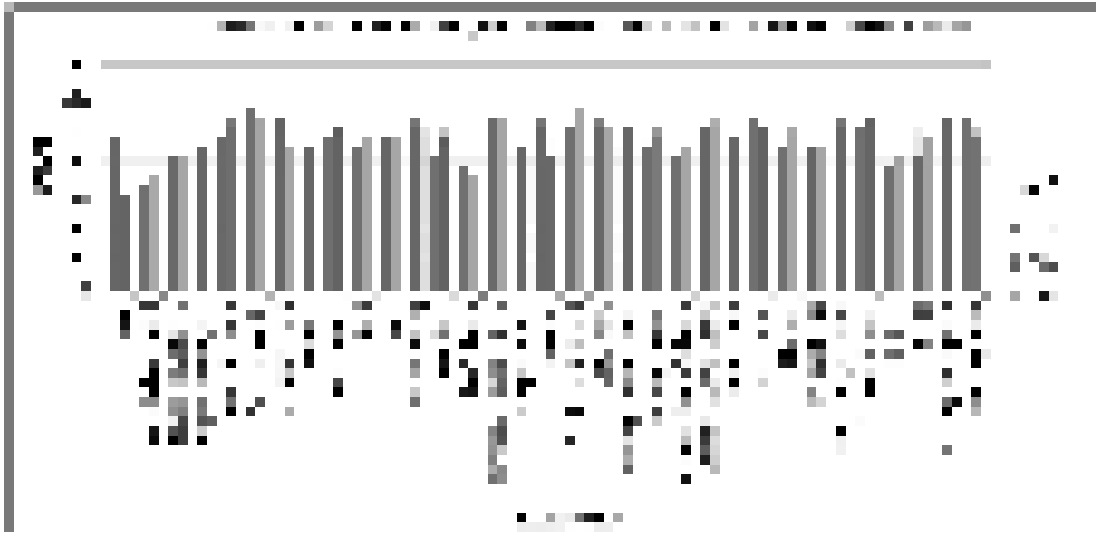
Berdasarkan tabel 4.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan untuk SD paling banyak dari jenis kelamin laki-laki di Kota Binjai dengan jumlah 119,14, sedangkan jenjang pendidikan SLTP APK terbanyak adalah Kota Medan dengan jenis kelamin laki-laki 109,76. Sedangkan tingkat SLTA adalah Kabupaten Toba Samosir .dengan jenis kelamin laki-laki 114,63.



Gambar 4.1. Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan SD dan Jenis Kelamin



Gambar 4.2. Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan SLTP dan Jenis Kelamin



Gambar 4.3. Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan SLTA dan Jenis Kelamin

4.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah, Jenis Kelamin, dan Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 4.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

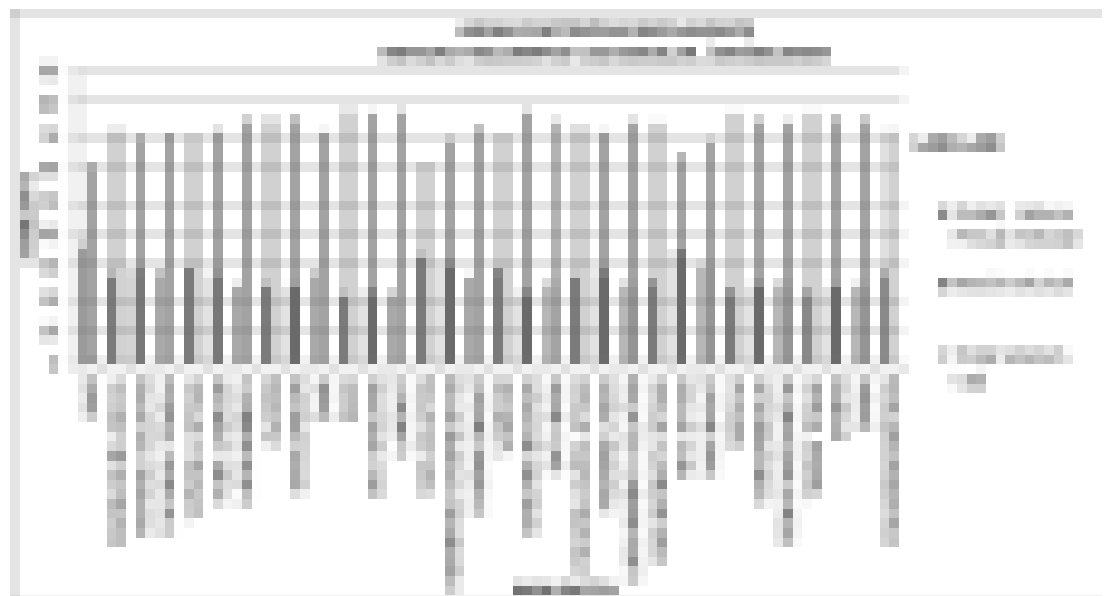
NO	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI				PEREMPUAN				LAKI-LAKI+		PEREMPUAN	
		Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	JUMLA H	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	JUMLA H	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	JUMLA H
		-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
01.	NIAS	1.75	36.82	61.43	100	3.51	27.19	69.3	100	2.65	31.88	65.47	100
02.	MANDAILING NATAL	0.16	27.65	72.19	100		25.59	74.41	100	0.08	26.59	73.33	100
03.	TAPANULI SELATAN	0.74	29.21	70.05	100	0.15	27.2	72.65	100	0.44	28.19	71.37	100
04.	TAPANULI TENGAH	0.28	28.71	71.01	100	0.05	28.71	71.25	100	0.16	28.71	71.13	100
05.	TAPANULI UTARA		30.03	69.97	100		28.35	71.65	100		29.17	70.83	100
06.	TOBA SAMOSIR	0.27	27.89	71.83	100	0.25	24.71	75.04	100	0.26	26.28	73.46	100
07.	LABUHANBATU	0.26	24.36	75.38	100	0.22	25.65	74.13	100	0.24	25	74.76	100
08.	ASAHAN	0.07	24.32	75.61	100		23.13	76.87	100	0.03	23.73	76.24	100
09.	SIMALUNGUN		24.11	75.89	100	0.05	21.86	78.09	100	0.03	22.97	77	100
10.	DAIRI	0.52	28.31	71.17	100	0.13	26.13	73.74	100	0.32	27.21	72.47	100
11.	KARO	0.35	21.25	78.4	100	0.21	21.71	78.08	100	0.28	21.48	78.24	100
12.	DELI SERDANG	0.35	22.59	77.06	100	0.07	23.56	76.37	100	0.21	23.07	76.72	100
13.	LANGKAT		22.17	77.83	100	0.1	22.01	77.89	100	0.05	22.09	77.86	100
14.	NIAS SELATAN	5.19	33.02	61.78	100	7.48	28.69	63.83	100	6.33	30.88	62.8	100
15.	HUMBANG HASUNDUTAN	0.14	31.08	68.78	100		27.12	72.88	100	0.07	29.07	70.86	100
16.	PAKPAK BHARAT		27.07	72.93	100		27.85	72.15	100		27.46	72.54	100
17.	SAMOSIR	0.02	29.21	70.77	100		25.15	74.85	100	0.01	27.16	72.83	100

18.	SERDANG BEDAGAI		22.11	77.89	100	0.17	23.32	76.51	100	0.08	22.72	77.2	100
19.	BATU BARA	0.12	25.21	74.67	100		25.87	74.13	100	0.06	25.54	74.4	100
20.	PADANG LAWAS UTARA	0.15	26.89	72.96	100		27.49	72.51	100	0.07	27.19	72.73	100
21.	PADANG LAWAS	0.22	28.65	71.13	100		25.18	74.82	100	0.11	26.93	72.96	100
22.	LABUHANBATU SELATAN	0.48	24.81	74.71	100	0.3	26.15	73.54	100	0.39	25.47	74.14	100
23.	LABUHANBATU UTARA	0.07	25.69	74.24	100		26.11	73.89	100	0.03	25.89	74.07	100
24.	NIAS UTARA	0.49	34.98	64.53	100	0.91	30.78	68.31	100	0.71	32.83	66.47	100
25.	NIAS BARAT	0.65	30.78	68.56	100	2.15	25.76	72.1	100	1.45	28.11	70.44	100
26.	SIBOLGA		22.81	77.19	100		24.35	75.65	100		23.58	76.42	100
27.	TANJUNGBALAI	0.14	24.49	75.37	100	0.67	25.84	73.49	100	0.4	25.16	74.43	100
28.	PEMATANGSIANTAR	0.09	25.26	74.65	100		24.15	75.85	100	0.04	24.69	75.27	100
29.	TEBING TINGGI	0.33	22.46	77.22	100	0.19	22.06	77.75	100	0.26	22.25	77.49	100
30.	MEDAN	0.03	23.85	76.12	100	0.23	24.94	74.83	100	0.13	24.4	75.47	100
31.	BINJAI		24.37	75.63	100	0.14	22.66	77.2	100	0.07	23.51	76.42	100
32.	PADANGSIDIMPUAN		28.39	71.61	100		30.13	69.87	100		29.29	70.71	100
33.	GUNUNGSITOLI	0.29	29.67	70.04	100	0.3	25.24	74.46	100	0.3	27.38	72.32	100
	SUMATERA UTARA	0.29	25.03	74.67	100	0.33	24.68	74.99	100	0.31	24.85	74.84	100
	Perkotaan	0.14	23.88	75.98	100	0.14	24.5	75.35	100	0.14	24.2	75.66	100
	Perdesaan	0.46	26.23	73.31	100	0.53	24.86	74.61	100	0.49	25.54	73.97	100

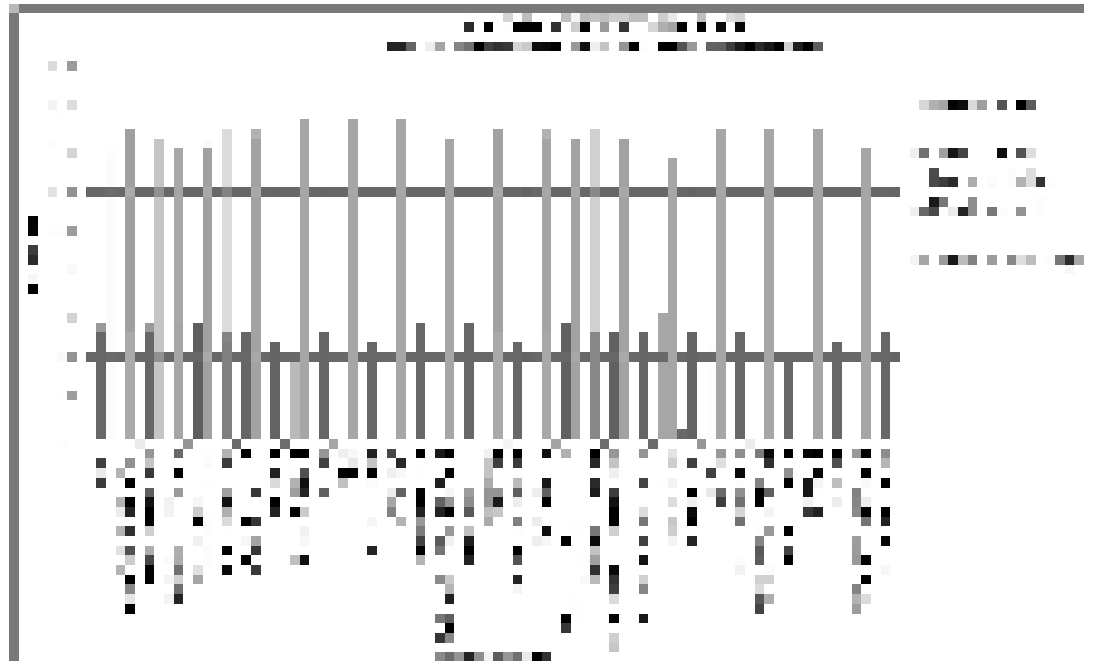
Sumber data: BPS

Berdasarkan data 4.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari jenis kelamin laki-laki tertinggi yang tidak pernah/belum bersekolah yaitu di Kabupaten Nias Selatan 5.19 sedangkan laki-laki yang masih sekolah angka tertinggi dari Kabupaten Nias Selatan 36.82, tidak sekolah lagi angka tertinggi dari Kabupaten Karo 78,40.

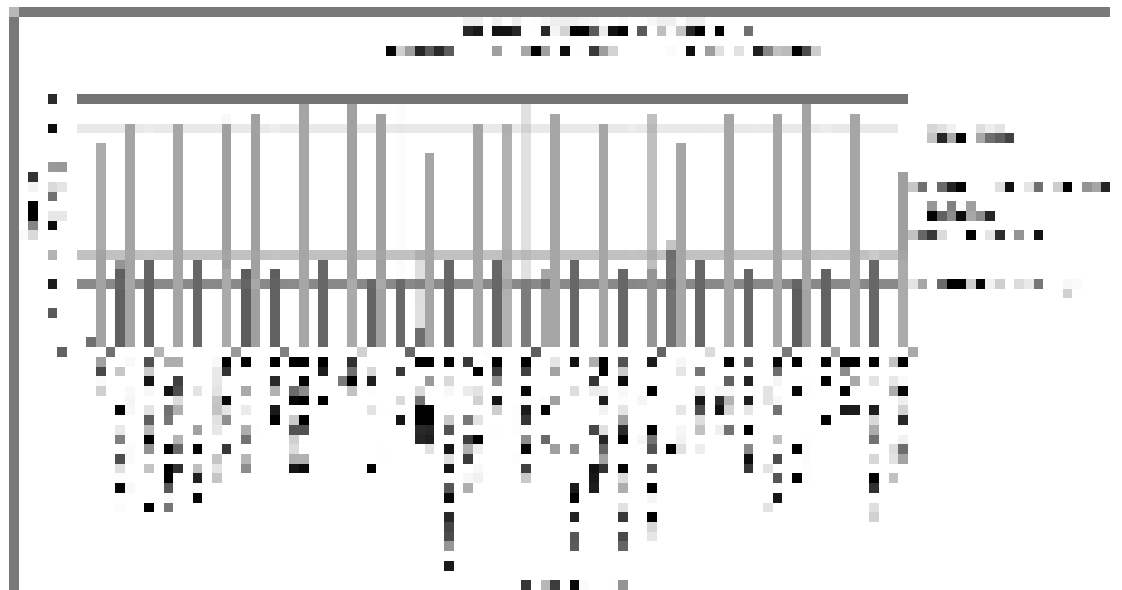
Sedangkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari jenis kelamin perempuan tertinggi yang tidak pernah/belum bersekolah yaitu di Kabupaten Nias Selatan 7.48 sedangkan perempuan yang masih sekolah angka tertinggi 30.78 dari Kabupaten Nias Utara, tidak sekolah lagi angka tertinggi dari Kabupaten Simalungun 78,09. Sedangkan dari segi jumlah keseluruhan laki-laki dan perempuan yang tidak pernah/belum bersekolah yaitu di Kabupaten Nias Selatan 6.33 sedangkan yang masih sekolah angka tertinggi dari Kabupaten Nias 31.88, tidak sekolah lagi angka tertinggi dari Kabupaten Karo 78,24.



Gambar 4.4. Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin (Laki-Laki)



Gambar 4.5. Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin (Perempuan)



Gambar 4.6. Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin (Laki-Laki+Perempuan)

4.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

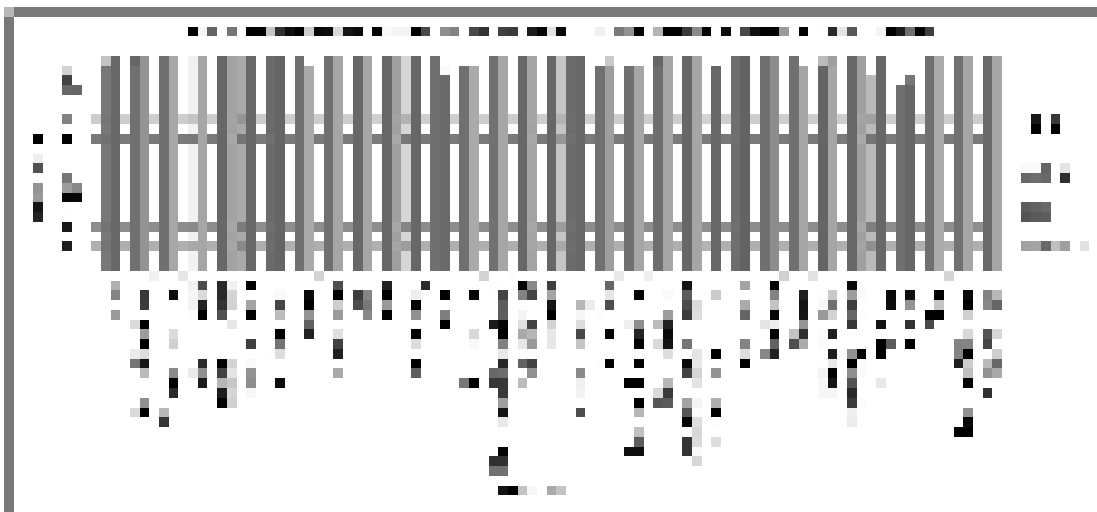
Tabel 4.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan, Jenis

Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	KAB./KOTA	SD			SLTP			SLTA		
		P	L	P+L	P	L	P+L	P	L	P+L
1	Nias	96.94	99.48	98.25	73.30	84.25	79.55	48.02	76.84	61.95
2	Mandailing Natal	97.42	97.73	97.56	89.45	82.55	85.92	62.03	51.24	56.60
3	Tapanuli Selatan	98.01	98.99	98.50	85.46	76.99	80.88	71.42	55.54	63.02
4	Tapanuli Tengah	98,26	97.33	97.76	91.55	85.32	88.26	79.04	53.23	65.78
5	Tapanuli Utara	100.00	100.00	100.00	90.51	91.31	90.93	77.36	7564	76.38
6	Toba Samosir	99.58	98.39	98.96	94.45	81.51	87.80	95.92	80.97	86.76
7	Labuhan Batu	98.60	99.40	99.01	87.52	87.20	87.37	74.20	54.00	63.30
8	Asahan	99.14	94.19	96.54	70.76	77.35	73.99	53.95	63.36	59.17
9	Simalungun	99.25	98.96	99.10	71.49	86.73	79.48	62.98	65.71	64.29
10	Dairi	100.00	97.99	98.96	91.10	89.79	90.43	83.82	77.33	80.52
11	Karo	100.00	98.68	99.35	86.03	81.32	83.47	79.33	72.57	76.25
12	Deli Serdang	98.55	98.54	98.54	69.44	68.91	69.17	67.96	72.35	70.27
13	Langkat	97.67	91.25	94.24	77.45	71.96	74.81	69.05	54.09	61.38
14	Nias Selatan	95.07	96.52	95.83	80.82	68.82	74.10	56.73	59.04	57.92
15	Humbang Hasundutan	100.00	100.00	100.00	93.44	90.34	91.84	89.82	86.06	87.80
16	Pakpak Barat	98.86	100.00	99.46	97.07	88.38	93.10	87.50	69.55	77.30
17	Samosir	100.00	100.00	100.00	97.29	85.58	90.36	79.20	77.96	78.58
18	Serdang Bedagai	97.54	97.68	97.61	76.56	75.06	75.74	75.25	57.75	66.91
19	Batu Bara	95.78	98.07	96.98	74.99	73.64	74.28	75.48	48.35	62.21
20	Padang Lawas Utara	94.48	97.76	96.12	86.57	83.54	85.08	84.24	60.47	71.76
21	Padang Lawas	97.44	99.05	98.17	77.25	78.73	78.12	72.41	63.77	66.98
22	Labuhan Batu Selatan	97.19	98.75	98.01	88.22	79.44	83.94	85.22	69.96	76.72
23	Labuhan Batu Utara	100.00	93.94	96.97	77.00	73.62	75.22	71.90	62.46	67.29
24	Nias Utara	98.14	99.31	98.72	86.99	80.74	83.41	82.83	72.41	78.00
25	Nias Barat	100.00	100.00	100.00	85.75	80.90	83.32	88.92	81.76	85.45
26	Sibolga	99.03	90.58	94.99	87.39	82.74	85.20	95.55	78.51	85.37
27	Tanjung Balai	98,13	96.81	97.44	87.05	76.44	81.47	81.99	62.25	72.90
28	Pematang Siantar	100.00	99.21	99.60	89.18	90.46	89.80	83.92	76.12	79.92
29	Tebing Tinggi	90.61	100.00	95.52	89.99	81.85	8547	76.90	68.13	72.61
30	Medan	87.41	87.87	87.65	74.10	72.55	73.36	62.18	5172	56.79
31	Binjai	100.00	98.98	99.46	90.25	69.49	79.37	71.62	77.68	74.60
32	Padang Sidmpuan	98.71	99.14	98.93	83.70	94.09	88.58	83.52	79.52	81.73
33	Gunung Sitoli	99.69	100.00	99.85	85.48	87.80	86.58	88.20	80.77	83.99
	SUMATERA UTARA	96.83	96.32	96.57	79.59	77.87	78.71	70.48	63.45	66.85
	- Perkotaan	95.57	94.67	95.11	78.40	74.84	76.62	68.77	62.91	65.76
	- Perdesaan	97.94	97.80	97.87	80.64	80.36	80.49	72.24	64.00	67.96

Sumber data: BPS

Berdasarkan tabel 4.3 Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan tertinggi 100,00 SD dari jenis kelamin laki-laki adalah Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Samosir, Nias Barat, Tebing Tinggi, Gunung Sitoli. jenjang pendidikan terendah 87,87 SD dari jenis kelamin laki-laki adalah Medan. Jenjang pendidikan tertinggi 100,00 SD dari jenis kelamin perempuan adalah Tapanuli Utara, Dairi, Karo, Humbang Hasudutan, Samosir, Labuhan Batu Utara, Nias Barat, Pematang Siantar, Binjai. Jenjang pendidikan terendah 87,41 SD dari jenis kelamin perempuan adalah Medan. Jenjang pendidikan tertinggi 94,09 SLTP dari jenis kelamin laki-laki adalah Kota Padang Sidempuan. Jenjang pendidikan terendah 68,82 SLTP dari jenis kelamin laki-laki adalah Nias Selatan. Jenjang pendidikan tertinggi 97,29 SLTP dari jenis kelamin perempuan adalah Samosir. Jenjang pendidikan terendah 69,44 SLTP dari jenis kelamin perempuan adalah Deli Serdang. Jenjang pendidikan tertinggi 86,06 SLTA dari jenis kelamin laki-laki adalah Humbang hasundutan. Jenjang pendidikan terendah 51,24 SLTA dari jenis kelamin laki-laki adalah Mandailing Natal. Jenis pendidikan tertinggi 95,92 SLTA dari jenis kelamin perempuan adalah Toba Samosir. Jenis pendidikan terendah 48,02 SLTA dari jenis kelamin perempuan adalah Nias.



Gambar 4.7. Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan (SD) dan Jenis Kelamin

4.4 Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara

Salah satu indikator pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menurut MDGs adalah angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun. Kelompok penduduk usia sekolah ini adalah kelompok penduduk usia produktif, sebagai sumber daya pembangunan yang seharusnya memiliki pendidikan yang memadai dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, dianggap penting untuk melihat perkembangan kemajuan indikator Angka Melek Huruf.

Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Buta Huruf (ABH). Angka Melek Huruf (AMH) ialah Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Buta Huruf (ABH) ialah angka buta huruf yaitu proporsi ketidakmampuan penduduk dalam membaca dan menulis huruf latin khususnya bahasa Indonesia dan huruf lainnya.

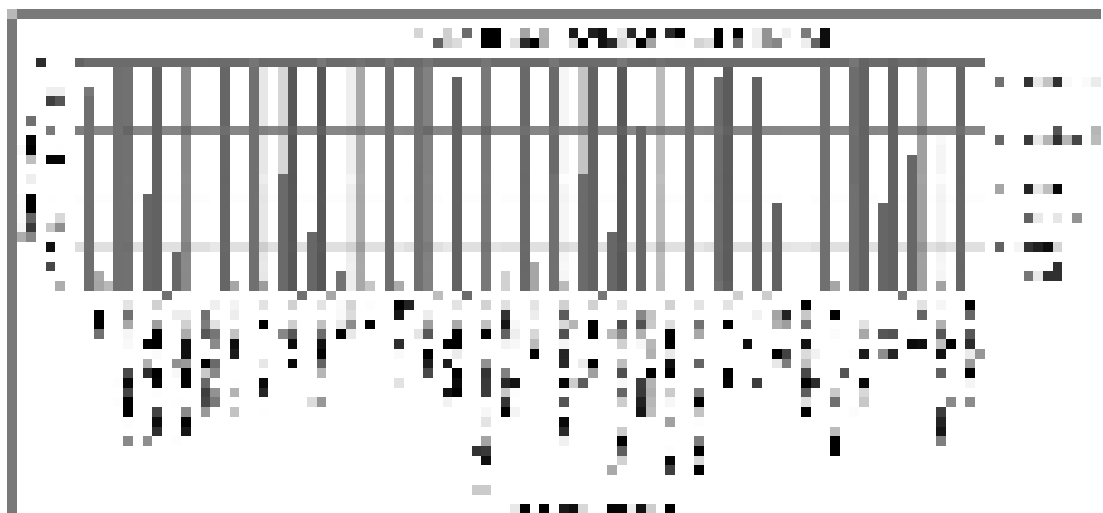
**Tabel 4.4. Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2016**

N O	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI					PEREMPUAN					LAKI-LAKI + PEREMPUAN				
		Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainnya	Melek Huruf	Buta Huruf	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainnya	Melek Huruf	Buta Huruf	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainnya	Melek Huruf	Buta Huruf
1	Nias	87.2	0.36	7.1	93.95	6.05	72.98	0.3	18.9	91.44	8.56	79.9	0.33	13.16	92.66	7.34
2	Mandailing Natal	98.33	43.16	0.97	98.76	1.24	97.76	51.8	1.78	98.88	1.12	98.04	47.6	1.39	98.82	1.18
3	Tapanuli Selatan	98.29	41.47	4.15	99.24	0.76	98.08	47.88	3.76	98.84	1.16	98.18	44.72	3.95	99.04	0.96
4	Tapanuli Tengah	97.77	16.72	2.48	99.15	0.85	96.91	17.59	2.8	98.18	1.82	97.34	17.16	2.65	98.67	1.33
5	Tapanuli Utara	99.7	1.12	1.92	99.7	0.3	98.57	1.6	1.66	98.75	1.25	99.12	1.37	1.79	99.22	0.78
6	Toba Samosir	98.91	1.22	5.88	99.55	0.45	97.98	1.46	3.91	98.49	1.51	98.44	1.34	4.88	99.01	0.99
7	Labuhan Batu	99.71	57.35	5.49	99.9	0.1	99.2	56.8	5.17	99.32	0.68	99.46	57.08	5.33	99.61	0.39
8	Asahan	98.87	50.45	1.46	99.29	0.71	96.8	55.58	1.23	97.98	2.02	97.83	53.01	1.35	98.64	1.36
9	Simalungun	99.33	25.84	2.06	99.54	0.46	97.53	26.04	2.48	97.99	2.01	98.42	25.94	2.27	98.76	1.24
10	Dairi	99.01	8.79	0.5	99.33	0.67	98.49	9.09	0.31	98.7	1.3	98.75	8.94	0.41	99.01	0.99
11	Karo	99.7	8.21	2.39	99.92	0.08	98.45	9.39	2.68	99.53	0.47	99.07	8.81	2.54	99.72	0.28
12	Deli Serdang	99.33	31.35	5.27	99.64	0.36	98.98	31.3	5.13	99.42	0.58	99.15	31.33	5.2	99.53	0.47
13	Langkat	99.11	55.95	1.03	99.42	0.58	97.56	59.61	1.21	98.43	1.57	98.34	57.77	1.12	98.93	1.07
14	Nias Selatan	76.16	0.09	19.14	92.2	7.8	67.81	0.36	23.14	88.52	11.48	72.02	0.22	21.12	90.38	9.62
15	Humbang Hasundutan	99.17	2.31	5.25	99.49	0.51	98.01	1.94	4.55	98.49	1.51	98.58	2.12	4.89	98.98	1.02
16	Pakpak Barat	99.8	7.96	0.21	99.8	0.2	98.12	9.35	0.57	98.36	1.64	98.97	8.65	0.39	99.09	0.91
17	Samosir	98.83	1.33	12.1	99.45	0.55	95.69	0.73	9.92	96.08	3.92	97.24	1.03	11	97.74	2.26
18	Serdang Bedagai	99.4	52.18	2.44	99.51	0.49	97.06	56.43	2.93	98.4	1.6	98.23	54.31	2.68	98.95	1.05
19	Batu Bara	98.96	49.9	1.08	99.26	0.74	96.5	54.71	1.84	97.86	2.14	97.73	52.3	1.46	98.56	1.44
20	Padang Lawas Utara	99.45	27.48	2.14	99.69	0.31	98.92	30.22	2.7	99.53	0.47	99.18	28.86	2.42	99.61	0.39
21	Padang Lawas	98.97	71.45	2.41	99.68	0.32	98.4	72.66	1.69	99.15	0.85	98.69	72.05	2.05	99.42	0.58
22	Labuhan Batu Selatan	99.33	57.52	2.34	99.78	0.22	98.99	59.35	2.84	99.49	0.51	99.16	58.42	2.58	99.63	0.37
23	Labuhan Batu Utara	99.19	51.04	0.72	99.46	0.54	97.22	55.09	0.82	97.38	2.62	98.22	53.05	0.77	98.43	1.57
24	Nias Utara	93.96	5.25	3.66	97.7	2.3	85.11	4.79	9.48	94.66	5.34	89.42	5.01	6.65	96.14	3.86

25	Nias Barat	90.84	0.44	4.27	95.01	4.99	78.38	0.93	13.19	91.53	8.47	84.21	0.7	9.02	93.16	6.84
26	Sibolga	99.63	39.03	1.42	99.84	0.16	98.92	40.24	1.15	99.05	0.95	99.27	39.64	1.29	99.44	0.56
27	Tanjung Balai	100	52.12	1.08	100	0	98.78	56.67	1.21	99.24	0.76	99.39	54.39	1.15	99.62	0.38
28	Pematang Siantar	99.91	24.82	5.96	100	0	99.43	28.45	4.4	99.43	0.57	99.66	26.7	5.16	99.71	0.29
29	Tebing Tinggi	99.48	46.7	4.74	99.9	0.1	99.15	50.17	5.13	99.55	0.45	99.31	48.47	4.94	99.72	0.28
30	Medan	99.73	37.66	5.41	99.96	0.04	99.26	39.96	4.11	99.5	0.5	99.49	38.83	4.75	99.72	0.28
31	Binjai	99.97	58.1	0.85	100	0	99.23	59.76	1.04	99.55	0.45	99.6	58.94	0.95	99.77	0.23
32	Padang Sidempuan	99.94	66.06	5.44	99.94	0.06	99.53	70.71	4.33	100	0	99.73	68.46	4.86	99.97	0.03
33	Gunung Sitoli	96.33	7.96	1.74	97.82	2.18	93.17	7.42	3.47	96.33	3.67	94.7	7.68	2.63	97.05	2.95
	SUMATERA UTARA	98.56	36.11	3.79	99.35	0.65	97.12	38.07	3.88	98.49	1.51	97.83	37.1	3.84	98.92	1.08
	- Perkotaan	99.58	39.66	4.55	99.83	0.17	98.84	41.9	4.07	99.28	0.72	99.2	40.79	4.3	99.55	0.45
	- Perdesaan	97.5	32.41	3	98.84	1.16	95.29	34.02	3.69	97.66	2.34	96.39	33.22	3.34	98.25	1.75

Sumber data : BPS

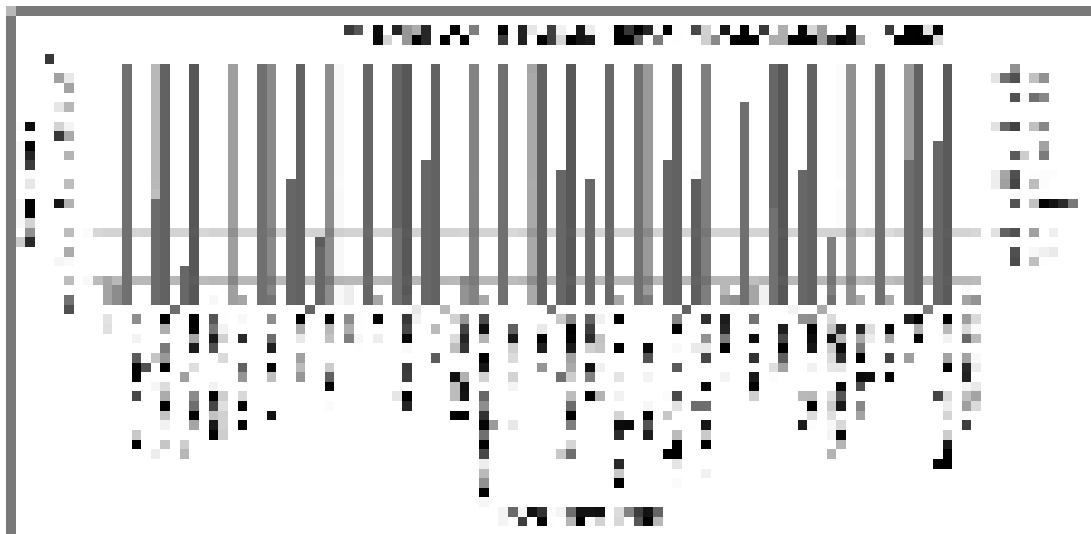
Berdasarkan tabel 4.4. Angka Melek Huruf (AMH) untuk huruf latin jenis kelamin laki-laki tertinggi 100,00 adalah Kota Tanjung Balai dan terendah 76,16 adalah Kabupaten Nias Selatan. Angka Melek Huruf (AMH) untuk huruf arab jenis kelamin laki-laki tertinggi 71,45 adalah Kabupaten Padang Lawas dan terendah 0,09 Kabupaten Nias Selatan. Angka Melek Huruf (AMH) untuk huruf lainnya jenis kelamin laki-laki tertinggi 19,14 adalah Kabupaten Nias Selatan dan terendah 0,21 adalah Kabupaten Pakpak Barat. Angka Melek Huruf (AMH) untuk melek huruf tertinggi 100,00 adalah Kota Tanjung Balai, Kota Pematang Siantar, dan Kota Binjai dan terendah 92,20 adalah Kabupaten Nias Selatan. Angka Buta Huruf (ABH) huruf tertinggi 7,80 adalah Kabupaten Nias Selatan, dan terendah 0,10 adalah Kabupaten Labuhanbatu. Angka Melek Huruf (AMH) untuk huruf latin jenis kelamin perempuan tertinggi 99,53 adalah Kota Padang Sidempuan dan terendah 67,81 adalah Kabupaten Nias Selatan. Angka Melek Huruf (AMH) untuk huruf arab jenis kelamin perempuan tertinggi 72,66 adalah Kabupaten Padang Lawas dan terendah 0,30 adalah Kabupaten Nias. Angka Melek Huruf (AMH) untuk huruf lainnya jenis kelamin perempuan tertinggi 23,14 adalah Kabupaten Nias Selatan dan terendah 0,31 adalah Kabupaten Dairi. Angka Melek Huruf (AMH) untuk melek huruf jenis kelamin perempuan tertinggi 100,00 adalah Kota Padang Sidempuan dan terendah 88,52 adalah Kabupaten Nias Selatan. Angka Melek Huruf (AMH) untuk buta huruf jenis kelamin perempuan tertinggi 11,48 adalah Kabupaten Nias Selatan dan terendah 0,45 adalah Kota Tebing Tinggi dan Kota Binjai.



Gambar 4.10. Grafik Persentase Laki-Laki Angka Melek Huruf



Gambar 4.11. Grafik Persentase Perempuan Angka Melek Huruf



Gambar 4.12. Grafik Persentase Laki-Laki + Perempuan Angka Melek Huruf

4.5 Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan negara sesuai amanat UUD 1945. Namun, hingga usia 71 tahun kemerdekaan RI, segenap masyarakatnya masih belum mempunyai akses mengenyam dunia pendidikan formal selayaknya. Data UNICEF tahun 2016 sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Begitupula data statistik yang dikeluarkan oleh BPS, bahwa di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota menunjukkan terdapat kelompok anak-anak tertentu yang terkena dampak paling rentan yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Benarkah ini karena faktor ekonomi, budaya atau sistem yang tidak berpihak pada mereka?

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, mengumumkan hasil penelitian Hasil Bantuan Siswa Miskin Endline di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Ada temuan menarik. Sebanyak 47,3 persen responden menjawab tidak bersekolah lagi karena masalah biaya, kemudian 31 persen karena ingin membantu orang tua dengan bekerja, serta 9,4 persen karena ingin melanjutkan pendidikan nonformal seperti pesantren atau mengambil kursus keterampilan lainnya. Mereka yang tidak dapat melanjutkan sekolah ini sebagian besar berijazah terakhir sekolah dasar (42,1 persen) maupun tidak memiliki ijazah (30,7 persen). Meski demikian, rencana untuk menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ternyata cukup besar, yakni 93,9 persen. Hanya 6,1 persen yang menyatakan tidak memiliki rencana untuk itu. Berikut ini dijelaskan deskripsi anak putus sekolah di Provinsi Sumatera Utara.

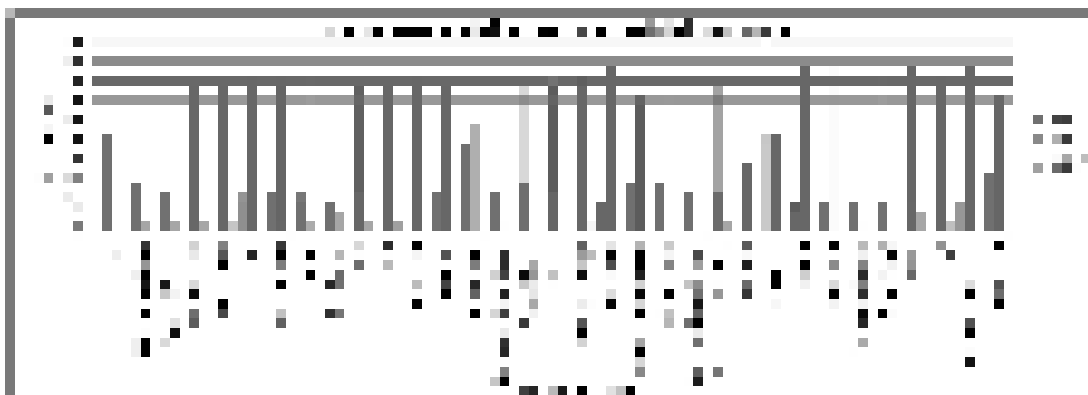
Tabel 4.5. Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin, Jenjang Pendidikan Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	KAB/KOTA	SD						SLTP						SLTA					
		L	% L	P	% P	L+P	% L+P	L	% L	P	% P	L+P	% L+P	L	% L	P	% P	L+P	% L+P
1	Nias	201	52.48	182	47.52	383	0.74	50	61.73	31	38.27	81	0.37	20	45.45	24	54.55	44	0.37
2	Mandailing Natal	642	27.28	1711	72.72	2353	4.53	227	32.99	461	67.01	688	3.15	112	36.25	197	63.75	309	2.59
3	Tapanuli Selatan	286	20.92	1081	79.08	1367	2.63	150	28.85	370	71.15	520	2.38	69	36.7	119	63.3	188	1.58
4	Tapanuli Tengah	340	23.04	1136	76.96	1476	2.84	151	37.47	252	62.53	403	1.85	97	39.92	146	60.08	243	2.04
5	Tapanuli Utara	370	24.42	1145	75.58	1515	2.92	248	36.1	439	63.9	687	3.15	156	40.41	230	59.59	386	3.24
6	Toba Samosir	179	17.83	825	82.17	1004	1.93	177	32.07	375	67.93	552	2.53	105	37.5	175	62.5	280	2.35
7	Labuhan Batu	306	18.5	1348	81.5	1654	3.19	147	32.17	310	67.83	457	2.09	124	35.94	221	64.06	345	2.89
8	Asahan	426	17.82	1964	82.18	2390	4.6	278	33.94	541	66.06	819	3.75	163	36.38	285	63.62	448	3.76
9	Simalungun	724	17.23	3479	82.77	4203	8.1	568	34.07	1099	65.93	1667	7.64	280	39.83	423	60.17	703	5.89
10	Dairi	273	22.27	953	77.73	1226	2.36	210	34.94	391	65.06	601	2.75	123	41.84	171	58.16	294	2.46
11	Karo	346	20.87	1312	79.13	1658	3.19	297	33.94	578	66.06	875	4.01	198	42.13	272	57.87	470	3.94
12	Deli Serdang	1052	18.31	4693	81.69	5745	11.1	783	31.62	1693	68.38	2476	11.3	406	38.3	654	61.7	1060	8.89
13	Langkat	919	22.24	3214	77.76	4133	7.96	591	39.74	896	60.26	1487	6.81	264	42.31	360	57.69	624	5.23
14	Nias Selatan	145	44.89	178	55.11	323	0.62	82	56.16	64	43.84	146	0.67	54	57.45	40	42.55	94	0.79
15	Humbang Hasundutan	211	21.33	778	78.67	989	1.9	179	37.37	300	62.63	479	2.19	101	42.26	138	57.74	239	2
16	Pakpak Barat	61	24.6	187	75.4	248	0.48	42	28.19	107	71.81	149	0.68	28	35.9	50	64.1	78	0.65
17	Samosir	159	20.65	611	79.35	770	1.48	121	38.54	193	61.46	314	1.44	56	36.6	97	63.4	153	1.28

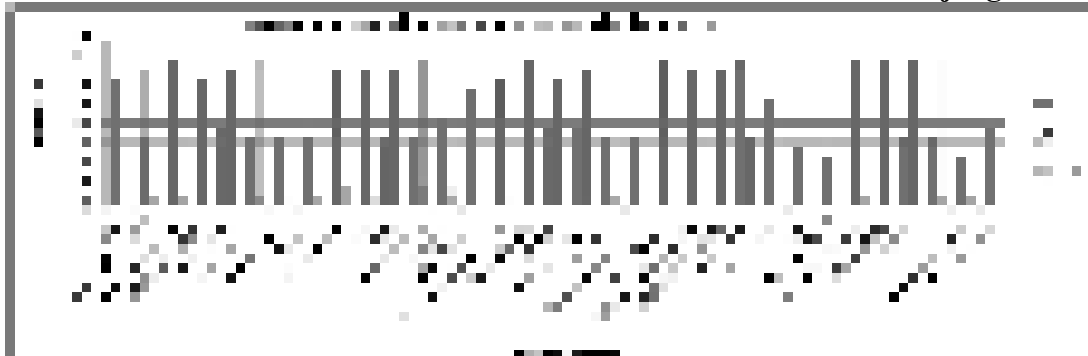
18	Serdang Bedagai	461	19.83	1864	80.17	2325	4.48	301	36.48	524	63.52	825	3.78	149	35.73	268	64.27	417	3.5
19	Batu Bara	188	13.17	1240	86.83	1428	2.75	182	32.5	378	67.5	560	2.57	74	30.58	168	69.42	242	2.03
20	Padang Lawas Utara	244	26.32	683	73.68	927	1.79	81	31.4	177	68.6	258	1.18	44	31.43	96	68.57	140	1.17
21	Padang Lawas	241	24.9	727	75.1	968	1.86	71	30.21	164	69.79	235	1.08	40	32.26	84	67.74	124	1.04
22	Labuhan Batu Selatan	194	21.3	717	78.7	911	1.75	64	34.22	123	65.78	187	0.86	47	35.61	85	64.39	132	1.11
23	Labuhan Batu Utara	306	20.99	1152	79.01	1458	2.81	116	33.53	230	66.47	346	1.59	79	38.54	126	61.46	205	1.72
24	Nias Utara	276	62.02	169	37.98	445	0.86	72	67.92	34	32.08	106	0.49	16	44.44	20	55.56	36	0.3
25	Nias Barat	166	49.11	172	50.89	338	0.65	60	50.85	58	49.15	118	0.54	34	54.84	28	45.16	62	0.52
26	Sibolga	53	12.65	366	87.35	419	0.81	52	26.53	144	73.47	196	0.9	47	32.64	97	67.36	144	1.21
27	Tanjung Balai	74	13.63	469	86.37	543	1.05	68	24.03	215	75.97	283	1.3	58	33.53	115	66.47	173	1.45
28	Pematang Siantar	173	15.54	940	84.46	1113	2.14	254	29.06	620	70.94	874	4	251	38.5	401	61.5	652	5.47
29	Tebing Tinggi	108	16.19	559	83.81	667	1.28	122	29.9	286	70.1	408	1.87	100	36.9	171	63.1	271	2.27
30	Medan	854	13.94	5271	86.06	6125	11.8	106 7	30.78	2400	69.22	3467	15.9	807	34.58	1527	65.42	2334	19.6
31	Binjai	196	16.74	975	83.26	1171	2.26	220	30.51	501	69.49	721	3.3	185	36.93	316	63.07	501	4.2
32	Padang Sidempuan	139	14.29	834	85.71	973	1.87	133	24.72	405	75.28	538	2.47	115	28.75	285	71.25	400	3.35
33	Gunung Sitoli	196	29.21	475	70.79	671	1.29	108	36	192	64	300	1.37	49	35.51	89	64.49	138	1.16
PROVSU		10509	20.24	41410	79.76	51919	100	727 2	33.32	14551	66.68	21823	100	4451	37.31	7478	62.69	####	100

Sumber data : BPS

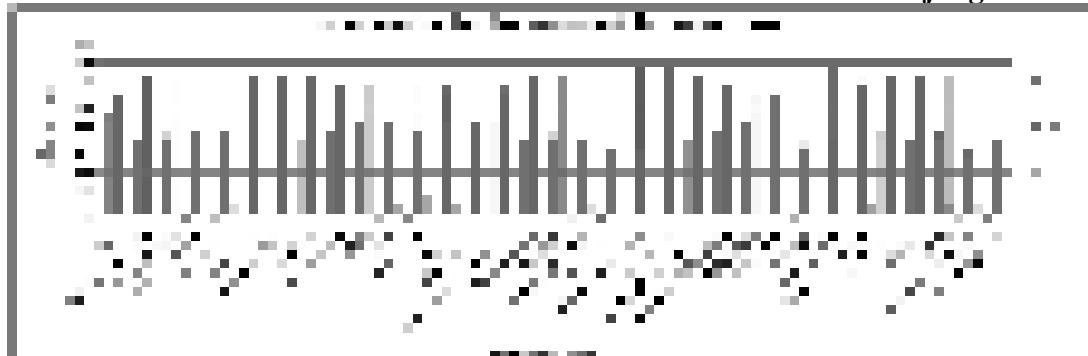
Berdasarkan tabel 4.5 jumlah siswa putus sekolah SD tertinggi 1052 untuk jenis kelamin laki-laki adalah Deli Serdang dan terendah 53 adalah Sibolga. Jumlah siswa putus sekolah SD tertinggi 5271 untuk jenis kelamin perempuan adalah Medan dan terendah 169 adalah Nias Utara. Jumlah siswa putus sekolah SLTP tertinggi 1067 untuk jenis kelamin laki-laki adalah Medan dan terendah 42 adalah Pakpak Barat. Jumlah siswa putus sekolah SLTP tertinggi 2400 untuk jenis kelamin perempuan adalah Medan dan terendah 31 adalah Nias. Jumlah siswa putus sekolah SLTA tertinggi 807 untuk jenis kelamin laki-laki adalah Medan dan terendah 16 adalah Nias Utara. Jumlah siswa putus sekolah SLTA tertinggi 1527 untuk jenis kelamin perempuan adalah Medan dan terendah 20 adalah Nias Utara.



Gambar 4.13. Grafik Persentase Jumlah Siswa Putus Sekolah Jenjang SD



Gambar 4.14. Grafik Persentase Jumlah Siswa Putus Sekolah Jenjang SLTP



Gambar 4.15. Grafik Persentase Jumlah Siswa Putus Sekolah Jenjang SLTA

4.6 Persentase Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provsu Tahun 2016.

Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan baik SD, SMP, SMA dan Akademi atau Perguruan Tinggi berdasarkan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.

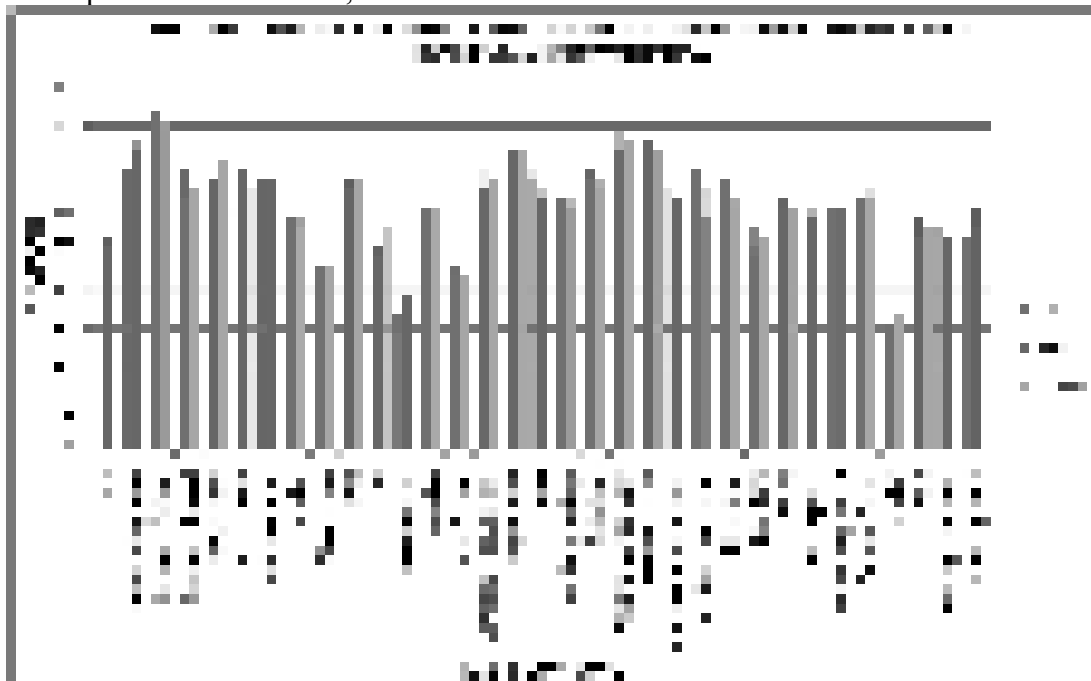
Tabel 4.6 Persentase Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi Yang di tamatkan, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	KAB/KOTA	SD			SLTP			SLTA			Akademi/PT		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Nias	33.37	25.77	29.47	11.39	7.65	9.47	13.43	9.16	11.24	2.29	2.55	2.42
2	Mandailing Natal	34.61	37.67	36.18	18.03	12.85	15.36	18.06	20.30	19.21	3.75	4.98	4.38
3	Tapanuli Selatan	42.08	39.49	40.77	13.70	9.82	11.74	18.07	20.50	19.30	2.13	3.12	2.63
4	Tapanuli Tengah	34.64	30.86	32.74	15.22	15.00	15.11	15.20	16.84	16.02	3.99	3.77	3.88
5	Tapanuli Utara	38.39	33.98	36.14	13.86	10.82	12.30	21.89	19.83	20.83	4.52	5.23	4.89
6	Toba Samosir	29.24	34.60	31.96	16.58	8.35	12.41	22.08	23.44	22.77	5.44	3.93	4.67
7	Labuhan Batu	33.83	33.24	33.54	17.82	17.59	17.70	22.01	22.59	22.30	4.20	4.14	4.17
8	Asahan	28.87	27.93	28.40	21.64	17.10	19.37	21.04	20.92	20.98	2.82	4.12	3.47
9	Simalungun	22.68	23.50	23.09	22.98	22.58	22.78	27.65	23.68	25.65	2.36	2.97	2.67
10	Dairi	32.81	33.58	33.20	16.77	14.14	15.44	21.63	23.49	22.57	2.78	2.72	2.75
11	Karo	29.88	24.65	27.23	17.01	20.41	18.73	24.41	24.79	24.60	4.36	6.48	5.43
12	Deli Serdang	16.38	19.53	17.95	18.66	23.71	21.18	39.68	33.61	36.65	5.38	4.77	5.08
13	Langkat	30.14	30.63	30.39	21.47	20.79	21.13	20.45	20.46	20.45	3.21	3.93	3.57
14	Nias Selatan	22.42	21.08	21.75	9.60	8.87	9.24	12.09	10.83	11.47	2.64	0.81	1.74
15	Humbang	35.11	32.57	33.82	16.99	11.77	14.34	20.12	19.89	20.00	2.87	5.54	4.22
16	Pakpak Barat	37.10	37.29	37.19	13.02	9.45	11.25	17.87	17.53	17.70	4.56	4.14	4.35
17	Samosir	34.08	31.70	32.87	9.89	9.70	9.79	27.20	18.83	22.96	5.09	6.02	5.56
18	Serdang Bedagai	31.62	29.60	30.61	19.97	20.96	20.47	22.06	18.31	20.18	2.28	3.38	2.83
19	Batu Bara	34.18	31.83	33.00	15.06	13.76	14.41	18.73	18.66	18.70	2.54	3.41	2.98
20	Padang Lawas	37.29	39.80	38.56	12.15	10.48	11.31	26.09	23.08	24.57	3.05	4.45	3.76
21	Padang Lawas	37.04	38.10	37.56	19.42	14.65	17.06	19.19	18.20	18.70	3.95	3.44	3.70
22	Labuhan Batu	32.01	30.77	31.41	17.01	16.94	16.98	23.55	21.39	22.49	2.70	5.88	4.26
23	Labuhan Batu Utara	34.62	28.94	31.80	19.99	19.61	19.80	22.17	20.24	21.22	2.61	3.61	3.11
24	Nias Utara	33.45	27.96	30.63	12.07	13.32	12.71	14.84	10.58	12.65	4.09	2.21	3.12
25	Nias Barat	27.70	24.56	26.03	14.81	12.23	13.44	16.08	9.78	12.73	4.23	3.15	3.66
26	Sibolga	30.01	30.71	30.36	15.36	11.82	13.58	26.46	24.30	25.37	4.71	6.77	5.74
27	Tanjung Balai	33.47	29.29	31.39	11.24	11.47	11.35	20.94	23.31	22.12	5.41	5.63	5.52
28	Pematang Siantar	29.52	30.19	29.87	13.00	11.48	12.21	31.40	32.55	31.99	7.04	5.89	6.45
29	Tebing Tinggi	31.37	31.96	31.67	13.54	11.16	12.32	28.71	30.89	29.82	5.88	6.42	6.16

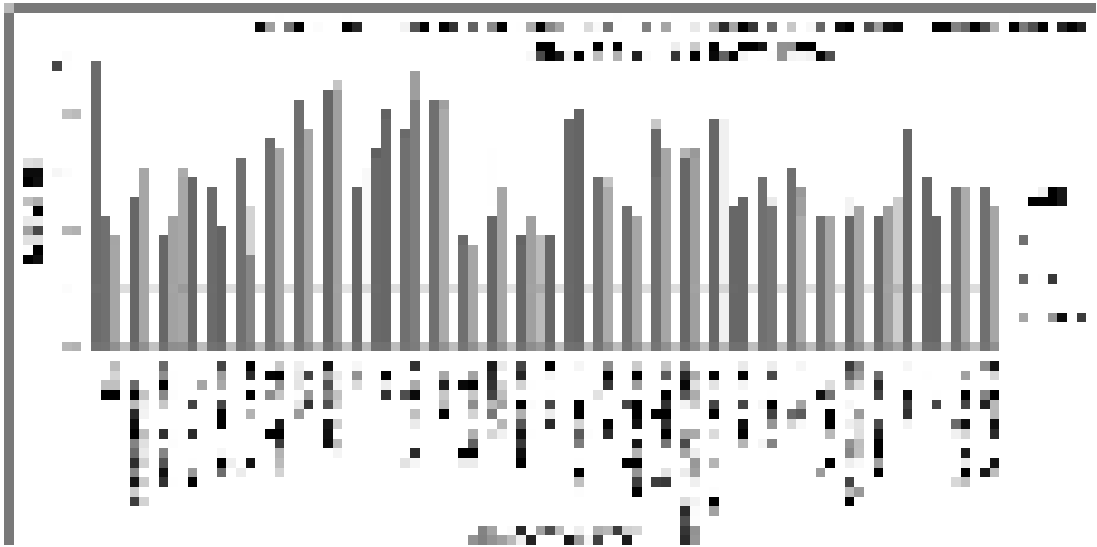
30	Medan	15.60	18.67	17.17	13.11	18.89	16.05	45.00	38.60	41.74	9.10	8.07	8.58
31	Binjai	26.67	28.60	27.64	14.71	11.19	12.93	30.95	32.55	31.76	8.77	8.28	8.52
32	Padang Sidmpuan	27.06	26.49	26.76	13.87	13.66	13.77	29.40	27.15	28.24	9.63	10.58	10.12
33	Gunung Sitoli	25.91	29.76	27.90	14.03	10.26	12.08	18.53	13.53	15.95	8.36	5.6	7.12
	SUMATERA	26.44	26.77	26.60	16.87	17.44	17.16	28.37	25.88	27.12	4.87	5.04	4.95
	- Perkotaan	21.63	23.39	22.52	15.40	17.37	16.40	35.69	32.23	33.94	7.02	6.87	6.94
	- Perdesaan	31.44	30.34	30.89	18.41	17.51	17.96	20.76	19.14	19.95	2.63	3.10	2.86

Sumber data: BPS

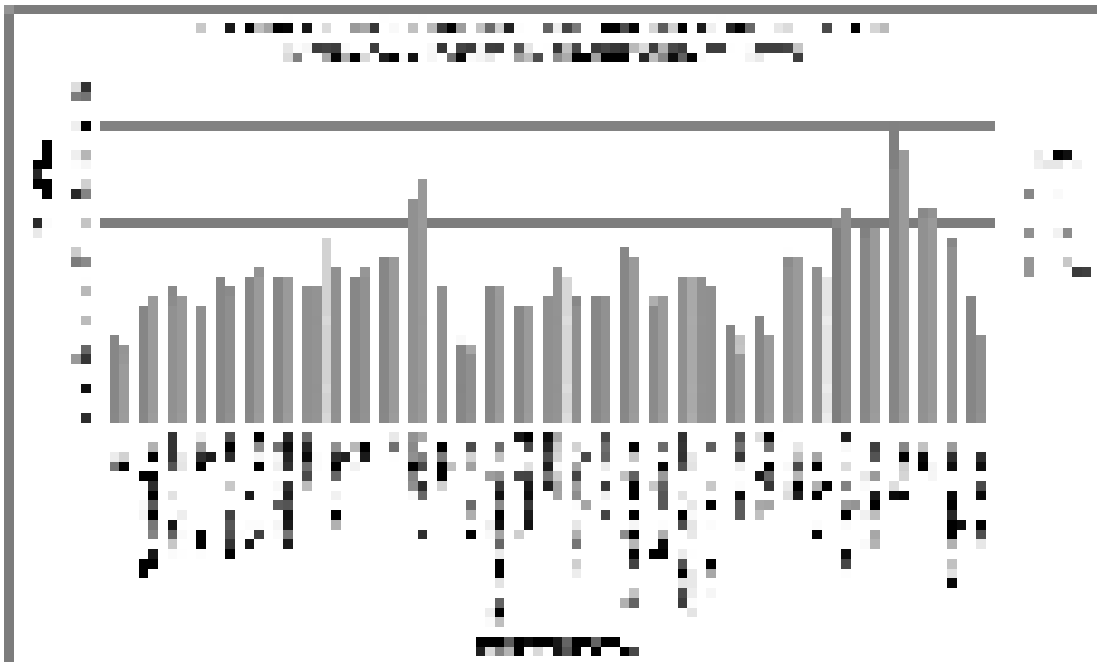
Berdasarkan tabel 4.6. persentase penduduk yang tamat SD tertinggi 42,08 untuk jenis kelamin laki-laki adalah Tapanuli Selatan dan terendah 15,60 adalah Medan. persentase penduduk yang tamat SD tertinggi 39,49 untuk jenis kelamin perempuan adalah Tapanuli Selatan dan terendah 18,67 adalah Medan. persentase penduduk yang tamat SLTP tertinggi 22,98 untuk jenis kelamin laki-laki adalah Simalungun dan terendah 9,60 adalah Nias Selatan. Persentase penduduk yang tamat SLTP tertinggi 23,71 untuk jenis kelamin perempuan adalah Deli Serdang dan terendah 7,65 adalah Nias. Persentase penduduk yang tamat SLTA tertinggi 45,00 untuk jenis kelamin laki-laki adalah Medan dan terendah 12,08 adalah Kota Gunung Sitoli . Persentase penduduk yang tamat SLTA tertinggi 38,60 untuk jenis kelamin perempuan adalah Medan dan terendah 9,16 adalah Nias. Persentase penduduk yang lulus tahap akademik tertinggi 9,63 untuk jenis kelamin laki-laki adalah Padang Sidempuan dan terendah 2,13 adalah Tapanuli Selatan. Persentase penduduk yang lulus tahap Akademik tertinggi 10,58 untuk jenis kelamin perempuan adalah Padang Sidempuan dan terendah 0,81 adalah Nias Selatan.



Gambar 4.16. Grafik Persentase Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi (SD) yang Ditamatkan, Jenis Kelamin di Kabutapen/Kota



Gambar 4.17 Grafik Persentase Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi (SLTP) yang Ditamatkan, Jenis Kelamin di Kabutapen/Kota



Gambar 4.18. Grafik Persentase Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi (SLTA) yang di tamatkan, Jenis Kelamin di Kabutapen/Kota

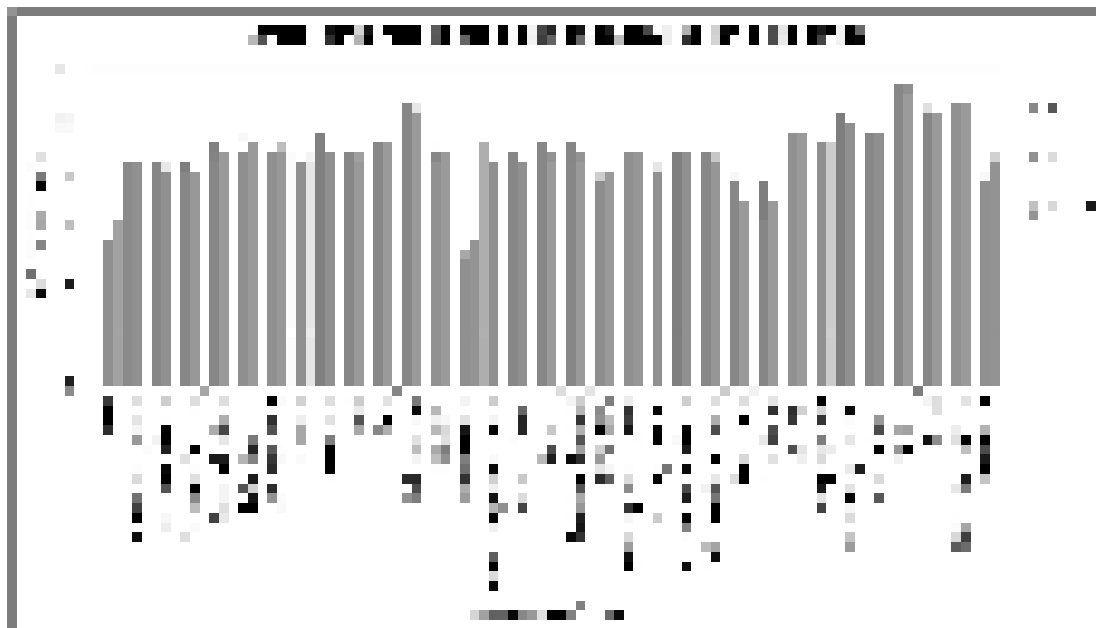
4.7 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 4.7. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	KAB/KOTA	JenisKelamin		L+P
		Laki-	Perempuan	
1	Nias	7.15	5.46	6.26
2	Mandailing Natal	8.6	8.56	8.58
3	Tapanuli Selatan	8.37	8.26	8.31
4	Tapanuli Tengah	8.32	8.15	8.23
5	Tapanuli Utara	9.12	8.66	8.89
6	Toba Samosir	9.7	8.98	9.35
7	Labuhan Batu	9.04	9	9.02
8	Asahan	8.83	8.44	8.64
9	Simalungun	9.53	8.98	9.25
10	Dairi	8.85	8.66	8.76
11	Karo	9.22	9.41	9.32
12	Deli Serdang	10.75	10.24	10.49
13	Langkat	8.98	8.69	8.83
14	Nias Selatan	5.96	4.99	5.47
15	Humbang Hasundutan	9.09	8.54	8.8
16	Pakpak Barat	8.73	8.44	8.59
17	Samosir	9.3	8.4	8.84
18	Serdang Bedagai	9.2	8.37	8.69
19	Batu Bara	8.25	7.89	8.07
20	Padang Lawas Utara	9.1	8.85	8.93
21	Padang Lawas	8.88	8.28	8.58
22	Labuhan Batu Selatan	8.89	8.89	8.89
23	Labuhan Batu Utara	8.76	8.59	8.72
24	Nias Utara	7.89	6.45	7.13
25	Nias Barat	7.86	6.15	6.94
26	Sibolga	9.6	9.55	9.57
27	Tanjung Balai	9.07	9.13	9.1
28	Pematang Siantar	10.23	10.06	10.14
29	Tebing Tinggi	9.68	9.71	9.69
30	Medan	11.57	11.01	11.28
31	Binjai	10.48	10.29	10.38
32	Padang Sidmpuan	10.57	10.59	10.58
33	Gunung Sitoli	9.43	7.92	8.65
PROVSU		9.67	9.25	9.46

Sumber data : BPS

Tabel 4.7 menjelaskan bahwa rata-rata lama sekolah yang paling tinggi di Provinsi Sumatera Utara terdapat di Kota Medan sebanyak 11.57 laki-laki dan 11.01 perempuan.



Gambar 4.19. Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin

4.8 Jumlah Guru Negeri / Swasta Yang Telah Memperoleh Sertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kinerja dan kompetensi guru memikul tanggung jawab utama dalam transformasi orientasi peserta didik dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari ketergantungan menjadi mandiri, dari tidak terampil menjadi terampil, dengan metode-metode pembelajaran bukan lagi mempersiapkan peserta didik yang pasif, melainkan peserta didik berpengetahuan yang senantiasa mampu menyerap dan menyesuaikan diri dengan informasi baru dengan berfikir, bertanya, menggali, mencipta dan mengembangkan cara-cara tertentu dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupannya.

Dalam kurun waktu 10 tahun proses sertifikasi guru yang merupakan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) telah mencapai angka signifikan. Di Indonesia, Sejak 2007 hingga 2017, total guru yang sudah tersertifikasi mencapai 1.471.812 orang. Sedangkan, guru yang belum tersertifikasi sekitar 656.150 orang. Melalui kerjasama dengan sekitar 46 Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) diharapkan para guru tersebut dapat dituntaskan proses sertifikasinya. Adapun jumlah guru di Provinsi Sumatera Utara yang sudah disertifikasi sebagai berikut:

Tabel. 4.8. Jumlah Guru Negeri/Swasta Yang Telah Memperoleh Sertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	KAB/KOTA	Guru SD						Guru SLTP						Guru SLTA						L+P Total
		L	% L	P	% P	L+P	% L+P	L	% L	P	% P	L+P	% L+P	L	% L	P	% P	L+P	% L+P	
1	Kabupaten Asahan	426	17.82	1964	82.18	2390	4.60	278	33.94	541	66.06	819	3.75	163	36.38	285	63.62	448	3.75	3657
2	Kabupaten Batubara	188	13.17	1240	86.83	1428	2.75	182	32.5	378	67.5	560	2.56	73	30.29	168	69.71	241	2.02	2229
3	Kabupaten Dairi	273	22.27	953	77.73	1226	2.36	210	34.94	391	65.06	601	2.75	123	41.84	171	58.16	294	2.46	2121
4	Kabupaten Deli Serdang	1052	18.31	4693	81.69	5745	11.06	783	31.62	1693	68.38	2476	11.34	406	38.3	654	61.7	1060	8.88	9281
5	Kabupaten Humbang Hasundutan	211	21.33	778	78.67	989	1.90	179	37.37	300	62.63	479	2.19	101	42.26	138	57.74	239	2.00	1707
6	Kabupaten Karo	346	20.87	1312	79.13	1658	3.19	297	33.94	578	66.06	875	4.00	198	42.13	272	57.87	470	3.94	3003
7	Kabupaten Labuhan Batu	306	18.5	1348	81.5	1654	3.18	147	32.17	310	67.83	457	2.09	124	35.94	221	64.06	345	2.89	2456

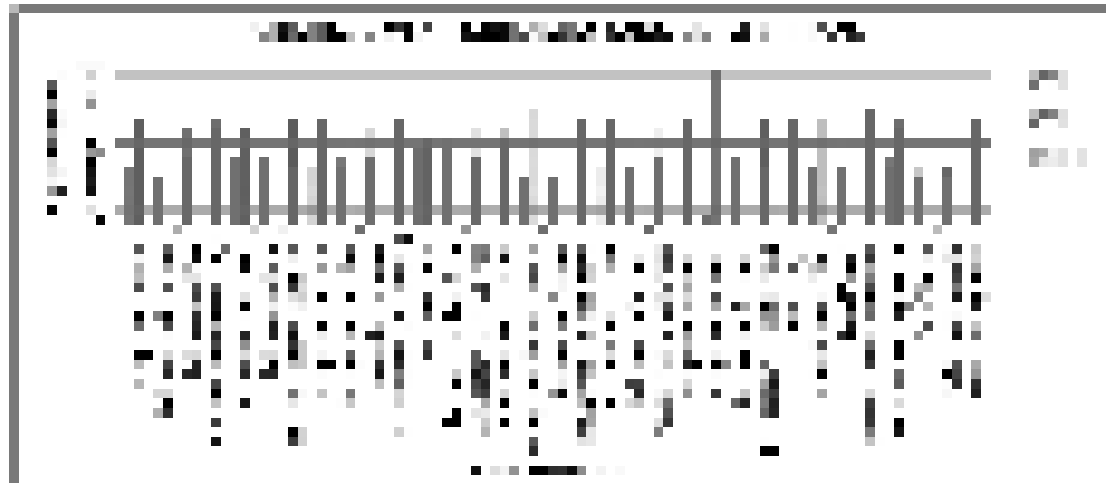
8	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	198	21.64	717	78.36	915	1.76	64	34.22	123	65.78	187	0.85	47	35.61	85	64.39	132	1.10	1234
9	Kabupaten Labuhan Batu	306	20.99	1152	79.01	1458	2.80	116	33.53	230	66.47	346	1.58	79	38.54	126	61.46	205	1.71	2009

	Utara																			
10	Kabupaten Langkat	919	22.24	3214	77.76	4133	7.96	591	39.74	896	60.26	1487	6.81	264	42.31	360	57.69	624	5.23	6244
11	Kabupaten Mandailing Natal	642	27.28	1711	72.72	2353	4.53	227	32.99	461	67.01	688	3.15	112	36.25	197	63.75	309	2.59	3350
12	Kabupaten Nias	201	52.48	182	47.52	383	0.73	50	61.73	31	38.27	81	0.37	20	45.45	24	54.55	44	0.36	508
13	Kabupaten Nias Barat	166	49.11	172	50.89	338	0.65	60	50.85	58	49.15	118	0.54	34	54.84	28	45.16	62	0.51	518
14	Kabupaten Nias Selatan	145	44.89	178	55.11	323	0.62	82	56.16	64	43.84	146	0.66	54	57.45	40	42.55	94	0.78	563
15	Kabupaten Nias Utara	276	62.02	169	37.98	445	0.85	72	67.92	34	32.08	106	0.48	16	44.44	20	55.56	36	0.30	587
16	Kabupaten Padang Lawas	241	24.9	727	75.1	968	1.86	71	30.21	164	69.79	235	1.07	40	32.26	84	67.74	124	1.03	1327
17	Kabupaten Padang Lawas Utara	244	26.32	683	73.68	927	1.78	81	31.4	177	68.6	258	1.18	44	31.43	96	68.57	140	1.17	1325
18	Kabupaten Pakpak Barat	61	24.6	187	75.4	248	0.47	42	28.19	107	71.81	149	0.68	28	35.9	50	64.1	78	0.65	475
19	Kabupaten Samosir	159	20.65	611	79.35	770	1.48	121	38.54	93	29.62	314	1.43	56	36.6	97	63.4	153	1.28	1237
20	Kabupaten Serdang Bedagai	461	19.83	1864	80.17	2325	4.47	301	36.48	524	63.52	825	3.78	149	35.73	268	64.27	417	3.49	3567
21	Kabupaten Simalungun	724	17.23	3479	82.77	4203	8.09	568	34.07	1099	65.93	1667	7.63	280	39.83	423	60.17	703	5.89	6573

22	Kabupaten Tapanuli Selatan	286	20.92	1081	79.08	1367	2.63	150	28.85	370	71.15	520	2.38	69	36.7	119	63.3	188	1.57	2075
23	Kabupaten Tapanuli Tengah	340	23.04	1136	76.96	1476	2.84	151	37.47	252	62.53	403	1.84	97	6.21	1465	93.79	1562	13.09	3441
24	Kabupaten Tapanuli Utara	370	24.42	1145	75.58	1515	2.91	248	36.1	439	63.9	687	3.14	156	40.41	230	59.59	386	3.23	2588
25	Kabupaten Toba Samosir	179	17.83	825	82.17	1004	1.93	177	32.07	375	67.93	552	2.52	105	37.5	175	62.5	280	2.34	1836
26	Kota Binjai	196	16.74	975	83.26	1171	2.25	220	30.51	501	69.49	721	3.30	185	36.93	316	63.07	501	4.19	2393
27	Kota Gunung Sitoli	196	29.21	475	70.79	671	1.29	108	36	192	64	300	1.37	49	35.51	89	64.49	138	1.15	1109

28	Kota Medan	854	13.94	5271	86.06	6125	11.79	1067	30.78	2400	69.22	3467	15.88	807	34.58	1527	65.42	2334	19.56	11926
29	Kota Padang Sidempuan	139	14.29	834	85.71	973	1.87	133	24.72	405	75.28	538	2.46	115	28.75	285	71.25	400	3.35	1911
30	Kota Pematang Siantar	173	15.54	940	84.46	1113	2.14	254	29.06	620	70.94	874	4.00	251	38.5	401	61.5	652	5.46	2639
31	Kota Sibolga	53	12.65	366	87.35	419	0.80	52	26.53	144	73.47	196	0.89	47	32.64	97	67.36	144	1.20	759
32	Kota Tanjung Balai	74	13.63	469	86.37	543	1.04	68	24.03	215	75.97	283	1.29	58	33.53	115	66.47	173	1.45	999
33	Kota Tebing Tinggi	108	64.67	59	35.33	167	0.32	122	29.9	286	70.1	408	1.86	100	36.9	171	63.1	271	2.27	846
PROVSU		10509	20.24	41410	79.76	51919	100	7272	33.32	14551	66.68	21823	100	4451	37.31	7478	62.69	11929	100	85671

Sumber data : Dinas Pendidikan



Gambar 4.22. Grafik Jumlah Guru SLTA Yang Bersertifikasi

4.9. Jumlah Peserta Kejar Paket A, B, dan C Serta Keaksaraan Fungsional (KF) Menurut Jenis Kelamin, dan Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara

Usaha untuk peningkatan mutu SDM melalui jalur pendidikan non formal (pendidikan luar sekolah) dapat ditempuh lewat pendidikan kesetaraan yang meliputi Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C. Kejar Paket A, B dan C ini diperlukan sebagai solusi bagi anak putus sekolah yang tidak dapat menamatkan sekolahnya baik ditingkat SD, SMP dan SMA. Peserta kejar Paket A dapat mengikuti Ujian Kesetaraan SD, peserta Kejar Paket B dapat mengikuti Ujian Kesetaraan tingkat SLTP dan peserta Kejar Paket C dapat mengikuti Ujian Kesetaraan SMU/SMK/MA. Ujian kesetaraan diselenggarakan dua kali dalam setahun, yaitu bulan Juli dan Oktober.

Beragam persoalan selalu mengikuti proses penyempurnaan pembangunan di bidang pendidikan Indonesia. Baik di bidang pendidikan formal, non formal maupun informal. Semua bidang memiliki kendala sendiri-sendiri. Pada jalur non formal (program pendidikan kesetaraan khususnya kejar paket A,B dan C) misalnya, hingga kini masih banyak hambatan sosial masyarakat. Hal ini disebabkan karena orang yang seharusnya mengikuti program pendidikan ini mayoritas berusia di atas 44 tahun, sehingga rata-rata mereka beranggapan, tak ada gunanya melanjutkan ke kesetaraan. Penyebab lainnya karena adanya perasaan malu di kalangan warga belajar sendiri karena program paket A ini untuk kesetaraan sekolah dasar.

Meski menyadari adanya hambatan, namun pemerintah tetap menjalankan

program ini. Karena hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari pemerintah untuk memfasilitasi dan memberikan kesempatan kepada setiap warga negaranya untuk mengakses pendidikan.

NO	KAB/KOTA	Paket A			Paket B			Paket C			KF		
			L	P L+P		L	L+P		L			L	L+P
	Nias			-			205			111			
	Mandailing Natal			-			176			445			
	Tapanuli Selatan			-			132			189			
	Tapanuli Tengah			-			147			334			
	Tapanuli Utara			-			191			167			
6	Toba Samosir			-			103			-			
7	Labuhan Batu			100			147			334			
8	Asahan			-			249			250			
9	Simalungun			100			425			201			
10	Dairi			-			191			133			
11	Karo			-			103			172			
12	Deli Serdang			100			147			1,335			
13	Langkat			100			249			667			
14	Nias Selatan			100			616			-			
15	Humbang			-			147			-			
16	Pakpak Barat			-			616			-			
17	Samosir			-			147			50			
18	Serdang Bedagai			60			205			417			
19	Batu Bara			100			278			111			
20	Padang Lawas Utara			100			59			67			
21	Padang Lawas			-			176			79			
22	Labuhan Batu			100			73			211			
23	Labuhan Batu Utara			-			117			-			
24	Nias Utara			-			117			44			
25	Nias Barat			-			29			111			
26	Sibolga			-			29			389			
27	Tanjung Balai			-			161			89			
28	Pematang Siantar			-			59			-			
29	Tebing Tinggi			-			103			167			
30	Medan			100			748			1,524			
31	Binjai			-			132			139			
32	Padang Sidempuan			-			147			389			
33	Gunung Sitoli			-			147			89			
	PROVSU			960			6,907			8,214			

Tabel 4.9 Jumlah Peserta Kejar Paket A,B,Dan C Serta Keaksaraan Fungsional (KF) Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

Berdasarkan tabel 4.9 peserta kejar paket A, B dan C yang paling tinggi adalah di Kota Medan 100 orang untuk paket A jenjang pendidikan di SD, dan 748 orang untuk paket B jenjang pendidikan SMP dan paket C 1.524 orang untuk jenjang pendidikan SMU dan sederajat lainnya.

4.10. Jumlah Kelulusan Paket A, B, dan C Menurut Jenis Kelamin, dan Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 4.10. Jumlah Kelulusan Paket A,B, dan C menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	KAB/KOTA	Paket A			Paket B			Paket C		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Nias			-			323			43
2	Mandailing Natal			-			217			191
3	Tapanuli Selatan			-			80			74
4	Tapanuli Tengah			-			61			134
5	Tapanuli Utara			-			57			70
6	Toba Samosir			-			45			-
7	Labuhan Batu			34			69			-
8	Asahan			-			102			124
9	Simalungun			30			164			74
10	Dairi			-			83			57
11	Karo			-			67			71
12	Deli Serdang			30			323			501
13	Langkat			29			217			254
14	Nias Selatan			28			224			-
15	Humbang			-			61			-
16	Pakpak Barat			-			12			-
17	Samosir			-			43			20
18	Serdang Bedagai			18			81			157
19	Batu Bara			29			111			37
20	Padang Lawas Utara			32			26			28
21	Padang Lawas			-			84			36
22	Labuhan Batu Selatan			34			53			90
23	Labuhan Batu Utara			-			35			-
24	Nias Utara			-			50			44
25	Nias Barat			-			11			16
26	Sibolga			-			12			-
27	Tanjung Balai			-			27			37
28	Pematang Siantar			-			61			143
29	Tebing Tinggi			-			41			66

30	Medan			30			283			558
31	Binjai			-			48			50
32	Padang Sidmpuan			-			66			161
33	Gunung Sitoli			-			60			35
	PROVSU			294			2.817			3.178

Sumber Data : Dinas Pendidikan

Berdasarkan tabel 4.10 jumlah kelulusan peserta paket A di Sumatera Utara paling tinggi adalah di Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan sebanyak 34 orang, sedangkan lulus paket B tertinggi di Provinsi Sumatera Utara yaitu di Kabupaten Nias dan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 323 orang serta lulus paket C tertinggi adalah di Kota Medan sebanyak 558 orang.